

**PERBEKEL JOANYAR**

**KABUPATEN BULELENG**

**PERATURAN DESA JOANYAR**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

**TAHUN 2022-2027**

**PEMERINTAH DESA JOANYAR**

**KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2022**



PERBEKEL JOANYAR

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA JOANYAR

# NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL JOANYAR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6-28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 25-33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; 2. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Joanyar Tahun 2022-2027; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697) 4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1633); 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6 ); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3 ); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7); 22. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Joanyar Tahun 2022 Nomor 3). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOANYAR

dan

PERBEKEL JOANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JOANYAR TAHUN 2022-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Joanyar.
2. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Joanyar.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Joanyar.
4. Perbekel adalah Perbekel Joanyar.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Joanyar.
6. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
8. Bupati adalah Bupati Buleleng.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Seririt.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Perbekel adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Perbekel pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Perbekel adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Perbekel agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa JOANYAR Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang;
   2. Landasan Hukum;
   3. Maksud, Tujuan dan Manfaat;
   4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lain; dan
   5. Sistematika RPJM Desa.
2. BAB II GAMBARAN UMUM DESA
   1. Legenda dan Sejarah Desa;
   2. Kondisi Umum Desa;
   3. Kelembagaan Desa;
   4. Dinamika Konflik; dan
   5. Masalah dan Potensi.
3. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
   1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
   2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
   3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
   4. Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa;
   5. Musdes Rancangan RPJM Desa; dan
   6. Musyawarah BPD.
4. BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, KEUANGAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF
   1. Visi Desa;
   2. Misi Desa;
   3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
   4. Arah Kebijakan Keuangan Desa; dan
   5. Program Indikatif.
5. BAB V PENUTUP

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan struktur dan sistematika naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

* 1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

1. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Joanyar.

Ditetapkan di Joanyar

pada tanggal 29 Maret 2022

PERBEKEL JOANYAR,

NYOMAN MAS NESA

Diundangkan di Desa JOANYAR

pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DESA JOANYAR

KETUT BUDIASA

LEMBARAN DESA JOANYAR TAHUN 2022 NOMOR 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN I | : | PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027 |

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2022-2027

PEMERINTAH DESA JOANYAR

KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya RPJM Desa Joanyar periode tahun 2022 – 2027 dapat kami susun tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dimaksudkan untuk sebagai pedoman dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara profesional, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Dalam penyusunan RPJM Desa ini, banyak pihak yang telah terlibat. Untuk itu melalui kesempatan ini ijinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Tim Pendamping Lokal Desa Joanyar yang telah memberikan arahan dan pendampingan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.
2. Tim LP2M Universitas Udayana.
3. Tim Penyusun RPJM.
4. BPD, Kelian Dinas, Kelian Adat, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat dan pihak terkait.
5. Staf Pemdes yang telah banyak membantu tim dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RPJM desa ini.

Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

RPJM Desa Joanyar ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa Joanyar, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan untuk tercapainya tujuan pembangunan Desa Joanyar secara berkelanjutan (SDGs).

Joanyar, 15 Maret 2022

Perbekel Joanyar,

Nyoman Mas Nesa

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc111279024)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc111279025)

[DAFTAR GAMBAR v](#_Toc111279026)

[DAFTAR TABEL vi](#_Toc111279027)

[DAFTAR DIAGRAM vii](#_Toc111279028)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc111279029)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc111279030)

[1.2 Landasan Hukum 2](#_Toc111279031)

[1.3 Maksud, Tujuan, dan Manfaat 4](#_Toc111279032)

[1.3.1 Maksud 4](#_Toc111279033)

[1.3.2 Tujuan 5](#_Toc111279034)

[1.3.3 Manfaat RPJM Desa : 5](#_Toc111279035)

[1.4 Hubungan RPJM Desa Joanyar dengan Perencanaan Daerah 6](#_Toc111279036)

[1.5 Sistematika 7](#_Toc111279037)

[BAB II GAMBARAN UMUM DESA 8](#_Toc111279038)

[2.1 Legenda dan Sejarah Desa 8](#_Toc111279039)

[2.1.1 Legenda 9](#_Toc111279040)

[2.1.2 Sejarah 11](#_Toc111279041)

[2.2 Kondisi Umum Desa 14](#_Toc111279042)

[2.2.1 Peta Desa Joanyar 14](#_Toc111279043)

[2.2.2 Letak geografis 14](#_Toc111279044)

[2.2.3 Demografi 15](#_Toc111279045)

[2.2.4 Keadaan sosial 16](#_Toc111279046)

[2.2.5 Kondisi Ekonomi 18](#_Toc111279047)

[2.2.6 Pembagian Wilayah Desa 20](#_Toc111279048)

[2.3 Kelembagaan Desa 20](#_Toc111279049)

[2.3.1 Pemerintah Desa 21](#_Toc111279050)

[2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa 26](#_Toc111279051)

[2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 30](#_Toc111279052)

[2.3.4 Lembaga Adat Desa (LAD) 41](#_Toc111279053)

[2.4 Dinamika Konflik 45](#_Toc111279054)

[2.5 Masalah dan Potensi Desa Joanyar 46](#_Toc111279055)

[BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA JOANYAR 56](#_Toc111279056)

[3.1 Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Joanyar 58](#_Toc111279057)

[3.2 Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa 59](#_Toc111279058)

[3.2.1 Penyelarasan Visi Misi Perbekel dengan Visi Misi Kab Buleleng 60](#_Toc111279059)

[3.2.2 Mempelajari dan mengkaji Peta SDGS Desa 63](#_Toc111279060)

[3.2.3 Mempelajari dan mengkaji Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa 65](#_Toc111279061)

[3.2.4 Pengkajian Keadaan Desa lewat Banjar Dinas ( Musyawarah Banjar Dinas ) 65](#_Toc111279062)

[3.3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa 67](#_Toc111279063)

[3.4 Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa Joanyar Periode Tahun 2022 – 2027 68](#_Toc111279064)

[3.5 Musdes Rancangan RPJM Desa Joanyar Periode Tahun 2022-2027 68](#_Toc111279065)

[3.6 Musyawarah BPD 69](#_Toc111279066)

[3.7 Sosialisasi Perdes tentang RPJM Desa Joanyar 70](#_Toc111279067)

[BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF 71](#_Toc111279068)

[4.1 Visi Perbekel 71](#_Toc111279069)

[4.2 Misi Perbekel 74](#_Toc111279070)

[4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Joanyar 74](#_Toc111279071)

[4.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa Joanyar 82](#_Toc111279072)

[4.4.1 Pendapatan Desa 82](#_Toc111279073)

[4.4.2 Belanja Desa 82](#_Toc111279074)

[4.4.3 Pembiayaan Desa 82](#_Toc111279075)

[4.5 Program Indikatif 83](#_Toc111279076)

[BAB V PENUTUP 92](#_Toc111279077)

LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Prioritas sesuai dengan Bidang, Sub Bidang/Kegiatan RPJM Desa
2. SK Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Laporan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Desa
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
5. Berita Acara Lokakarya Desa
6. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa
7. Berita Acara Musdes Rancangan RPJM Desa
8. Berita Acara Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan Perdes RPJM Desa
9. SK BPD Penetapan Kesepakatan Penetapan Perdes RPJM Desa
10. Foto Dokumentasi

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2. 1 Peta Desa Joanyar 14](file:///E:\RPJM\draf\RPJM%20DESA%202021-2027%20FINAL.docx#_Toc98635836)

[Gambar 3. 1 Tahapan Mekanisme Penyusunan RPJM Desa 56](#_Toc98637535)

[Gambar 3. 2 Hasil Pendekatan Partisipatif melalui *Google Form* 57](#_Toc98637536)

[Gambar 3. 3 Pendekatan Perencanaan Pembangunan 58](#_Toc98637537)

[Gambar 3. 4 Hasil Capaian Skor SDGs Desa Joanyar 64](#_Toc98637538)

[Gambar 3. 5 Tahapan Pengkajian Keadaan Desa 65](#_Toc98637539)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 2. 1 Nama- nama Pejabat Perbekel Desa Joanyar dari awal hingga sekarang 11](#_Toc104686401)

[Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tahun 2020 15](#_Toc104686402)

[Tabel 2. 3 Jumlah penduduk Tahun 2020 15](#_Toc104686403)

[Tabel 2. 4 Tenaga Kerja Tahun 2020 16](#_Toc104686404)

[Tabel 2. 5 Tingkat Pendidikan 17](#_Toc104686405)

[Tabel 2. 6 Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2020 17](#_Toc104686406)

[Tabel 2. 7 Lembaga Perekonomian 19](#_Toc104686407)

[Tabel 2. 8 Analisis Dinamika Konflik Desa Joanyar 45](#_Toc104686408)

[Tabel 2. 9 Masalah dan Potensi Desa 47](#_Toc104686409)

[Tabel 3. 1 Penyelarasan Visi Misi Perbekel dengan Visi Misi Kab Buleleng 60](#_Toc106105042)

[Tabel 4. 1 Hubungan antara Tipologi Desa, SDGs dan Arah Kebijakan Pembangunan 75](#_Toc106105051)

[Tabel 4. 2 Program Indikatif 83](#_Toc106105052)

# DAFTAR DIAGRAM

[Diagram 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Joanyar 25](#_Toc104686610)

[Diagram 2. 2 Struktur BPD 29](#_Toc104686611)

[Diagram 2. 3 Struktur LPM 32](#_Toc104686612)

[Diagram 2. 4 Struktur PKK 33](#_Toc104686613)

[Diagram 2. 5 Struktur LINMAS 34](#_Toc104686614)

[Diagram 2. 6 Struktur Organisasi Kelompok Tani Kembang Sari 35](#_Toc104686615)

[Diagram 2. 7 Struktur Koperasi “Tani Tumbuh Mekar” 36](#_Toc104686616)

[Diagram 2. 8 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani “Desa Joanyar” 37](#_Toc104686617)

[Diagram 2. 9 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani Ternak “Munduk Sari” 38](#_Toc104686618)

[Diagram 2. 10 Struktur Organisasi Kelompok Lumbung Pangan Kembang Sari 39](#_Toc104686619)

[Diagram 2. 11 Struktur Organisasi Kube “Eka Cita Yasa Kerti” 40](#_Toc104686620)

[Diagram 2. 12 Diagram Venn Kelembagaan Desa Joanyar 44](#_Toc104686621)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Joanyar. Untuk itu maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya yang selaras dengan perencanaan pembangunan supra desa yaitu perencanaan di tingkat Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang disusun menggunakan skala prioritas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi Perencanaan Pembangunan Desa Joanyar merupakan proses/tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Joanyar.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri No. 114/2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Pada Pasal 4 Permendagri No. 114/2014, Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah No. 43/2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

## Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 teentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa;
25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Joanyar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## Maksud, Tujuan, dan Manfaat

### Maksud

Maksud penyusunan RPJM Desa Joanyar adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa, dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatantahunan yang dibiayai dari APB Desa, dan sumber pembiayaanAPBD Kabupaten, atau dari sumber lainnya.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerjatahunan pemerintah desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalamkonstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligusmemahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangkamewujudkan visi dan misi Perbekel Desa Joanyar..
4. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa dalam mencapaitujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan teratur.
5. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahamidan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasionaltahunan dalam rentang waktu enam tahunan.

### Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa Joanyar yaitu:

1. Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan;
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Manfaat RPJM Desa :

Penyusunan RPJM Desa Joanyar, bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa Joanyar, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa Joanyar;
3. Mewujudkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra Desa
7. Meningkatkan efisiensi sumber daya pembangunan dan efektifits program;.
8. Sebagai legitimasi program pembangunan di Tingkat Desa Joanyar;
9. Sebagai standar kualitas dan pengawasan program pembangunan di Desa Joanyar

## Hubungan RPJM Desa Joanyar dengan Perencanaan Daerah

Perencanaan pembangunan Desa Joanyar pada dasarnya terkait dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah, kerena keberhasilan pembangunan desa merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Regulasi perencanaan pembangunan pada tingkat daerah diatur dalam Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- undang tersebut mengatur mengenai alur perencanaan pada tingkat daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP Daerah). Perencanaan pembangunan desa diatur dalam UU No. 6/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Pasal 4). Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan periode waktu, perencanaan pembangunan desa dapat dikelompok ke dalam dua jenis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada RKP Desa terdapat Daftar Usulan RKP Desa, yaitu penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).

## Sistematika

Dokumen RPJM Desa Joanyar Tahun 2022-2027 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
|  |  | Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan manfaat, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lain dan sistematika. |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM DESA |
|  |  | Bab ini memaparkan legenda dan sejarah desa, kondisi umum desa, kelembagaan desa, dinamika konplik dan masalah dan potensi. |
| BAB III | : | PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA |
|  |  | Bab ini menguraikan proses penyusunan RPJM Desa yang meliputi sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJM Desa, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa, Musdes rancangan RPJM Desa dan Musyawarah BPD. |
| BAB IV | : | VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, KEUANGAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF |
|  |  | Bab ini memaparkan dan menjelaskan visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program indikatif. |
| BAB V | : | PENUTUP |
| LAMPIRAN | | |

# BAB II GAMBARAN UMUM DESA

Desa Joanyar adalah salah satu desa dari 20 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Seririt, yang, berjarak 3 km dari pusat Ibu Kota ke Camatan Seririt (berada di bagian Timur Wilayah Kecamatan Seririt), sedangkan dari Ibu Kota Kabupaten Buleleng berjarak 22 km. Desa Joanyar terdiri dari 2 (dua) Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Kajanan dan Banjar Dinas Kelodan, demikian juga dengan Desa Adatnya terdiri dari 2 (dua) Desa Adat yaitu Desa Adat Joanyar Kajanan dan Desa Adat Joanyar Kelodan.

## Legenda dan Sejarah Desa

Desa yang dimaksudkan dalam kontek Legenda dan Sejarah Desa Joanyar adalah awal mula keberadaan komunitas atau kelompok masyarakat yang berada di wilayah Desa Joanyar (wilayah saat ini), jadi tidak hanya dilihat dari perspektif desa sebagai unit pemerintahan yang terendah dalam struktur pemerintahan seperti sekarang ini. Oleh karena itu lingkup pembicaraannya juga akan masuk ke wilayah awal mula keberadaan kelompok masyarakat yang berkumpul di wilayah ini dari sisi keyakinan/kepercayaannya yang akhirnya membentuk Desa Adat. Hal ini penting karena keberadaan Desa Joanyar saat ini yang terdiri dari 2 (dua) Desa Adat (baca: hal yang unik, satu Desa Pemerintahan ada 2 Desa Adat), sangat dipengaruhi juga oleh nilai-nilai yang berkembang sesuai dengan kepercayaan/keyakinan di Desa Adat masing-masing.

Berbicara tentang asal mula terbentuknya Desa Joanyar, dibagi menjadi dua periode yaitu periode sebelum tahun 1927, selanjutnya didefinisikan sebagai Legenda Desa Joanyar, dan periode mulai tahun 1927, selanjutnya didefinisikan sebagai Sejarah Desa Joanyar.

Pendefinisian periode sebelum tahun 1927 sebagai Legenda Desa Joanyar karena asal-usul desa Joanyar tidak didukung oleh fakta hasil penelitian, atau bukti-bukti tertulis berupa prasasti, melainkan hanya melalui cerita/informasi dari para tokoh/tetua (pengelingsir) yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta empris berupa peninggalan-peningalan bangunan fisik, aset, dan keyakinan terutama yang terkait dengan tatanan kehidupan di Desa Adat.

Pendefinisian periode mulai tahun 1927 sebagai Sejarah Desa Joanyar karena mulai tahun 1927 sudah ditemukan sebuah prasasti/tulisan pada bangunan Pura Desa-Segara yang bertuliskan 28 Februari 1927. Namun demikian, secara definitif keberadaan Desa Joanyar sebagaiunit struktur pemerintahan terkecil dimulai dari sebelum tahun 1940an yang ditandai atau didukung oleh bukti-bukti tertulis seperti keberadaan Perbekel yang menjabat,dan bukti-bukti lainnya.

Legenda dan Sejarah Desa Joanyar ini dapat saja berubah atau berifat tentatif artinya jika ada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik/keilmuan, maka legenda atau sejarah Desa Joanyar akan disesuaikan dengan hasil penelitian tersebut.

### Legenda

Legenda Desa Joanyar ada 2 (dua) versi yaitu: pertama versi yang sangat terkait dengan asal muasal keberadaan Desa Adat Joanyar Kelodan; ke dua versi yang berkaitan dengan keberadaan Desa Adat Joanyar Kajanan, yang akhirnya dari kedua versi itu menjadi Masyarakat Desa Joanyar.

Pada zaman dahulu diceritakan adanya sekelompok masyarakat yang berasal dari Desa Gelgel, Kerajaan Gelgel Kabupaten Klungkung melakukan perjalanan ke kawasan Bali Utara (Buleleng) dan akhirnya menetap di wilayah Desa Joanyar bagian Utara (Menurut Babad Pasek disebutkan di Banjar Dawan), yang selanjutnya seiring perjalanan waktu membentuk satu komunitas masyarakat adat yang sekarang sebagai Desa Adat Joanyar Kelodan. Sebagai sebuah masyarakat adat, tentu mempunyai tempat pemujaan dan sarana kelengkapan upacaranya. Tempat pemujaan seperti Pura Ҫiwa, demikian juga Pura Dalem. Pura Ҫiwa adalah sebagai tempat pemujaan dan sekaligus sebagai tempat nunas tirta di saat masyarakat melaksanakan upacara seperti Manusia Yadnya dan Pitra yadnya, karena pada jaman itu tidak ada seorang Sulinggih. Adanya seperangkat gamelan (gong) juga merupakan bukti otentik yang masih sampai sekarang.

Kemudian pada saat Kerajaan Kalianget dan masyarakatnya semakin berkembang, maka masyarakat Joanyar yang sudah ada di bagian utara dengan peradaban dan kondisi di jaman itu, lama kelamaan mulai merasa terdesak dan tidak nyaman, maka sebagian/seluruh masyarakatnya meninggalkan atau melakukan perjalanan/mengungsi menuju ke timur di Wilayah Kecamatan Banjar tepatnya di Desa Tampekan. Singkat cerita dengan semakin berkembangnya penduduk di sana, mulailah mendirikan Pura Kahyangan Desa sebagai tempat pemujaan dan juga tempat pemujaan keluarga pasek. Setelah kondisi di Desa Joanyar sudah mulai aman dan kondusif, maka sebagian masyarakat yang ada di Desa Tampekan kembali ke desa asalnya dengan membawa sebagian dari seperangkat gambelan berupa Gong, yang kemudian diberi nama **“Jero-Anyar”,** yang berarti rumah baru.

Adapun bukti-bukti bahwa Desa Joanyar merupakan semetonan dari masyarakat Desa Tampekan adalah adanya seperangkat gamelan di Desa Tampekan dan sebagian lagi ada di Desa Joanyar berupa GONG, disamping itu hingga lebih kurang tahun 1970 masyarakatnya masih sering ikut dalam pelaksanaan upacara Dewa Yadnya ataupun dalam pelaksanaan upacara manusia yadnya dan pitra yadnya.

Sementara itu diceritakan juga adanya sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Kalianget dengan Pusat pemerintahannya di Desa Kalianget. Lama kelamaan dengan semakin bertambahnya penduduk, sebagian rakyat Kerajaan Kalianget membangun rumah/pondok di wilayah perkebunan di bagian selatan Wilayah Kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya sebagian masyarakat di wilayah bagian Selatan (kebun) membentuk komunitas adat tersendiri terpisah dari induk pemerintahan sebelumnya (Kalianget) yang selanjutnya disebut **Jeroanyar**. Jero berarti rumah, anyar berarti baru. Jadi Jeroanyar merupakan wilayah pemukiman yang baru. Dua aset tempat pemujaan yaitu Pura Desa yang letaknya di pusat pemerintahan (Desa Kalianget sekarang) menjadi milik masyarakat Adat Kalianget, sedangkan Pura Dalem menjadi tempat pemujaan khusus bagi masyarakat Adat yang baru terbentuk (yang sekarang menjadi masyarakat Adat Joanyar Kajanan). Sedangkan kuburan masih berada pada satu kawasan, tetapi juga sudah dibagi pamong yang sampai saat ini belum punya sertifikat. Pemisahan ini diperkirakan sudah terjadi sekitar tahun 1920an, karena bangunan Pura Desa Segara Desa Adat Joanyar Kajanan berangka tahun 28 Februari 1927. Ini artinya jika pembangunan pura itu selesai pada 28 Pebruari 1927, tentu terpisahnya Desa Adat Joanyar Kajanan dari Desa Kalianget sudah terjadi sebelum tahun 1927 karena pembangunan pura pada zaman itu tentu memerlukan waktu yang cukup lama.

Peninggalan bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang menakjubkan adalah berupa permandian umum (sekarang disebut Tembuku/Tempat mebeji). Tempat permandian ini dihiasi dengan ornament ukiran, dan ornament berbentuk kera dan lain-lain, terbagi menjadi dua kamar, satu kamar untuk permandian laki, dan satu kamar untuk perempuan. Tempat permandian ini sungguh merupakan permandian yang sangat indah. Tetapi ketika Subak mendapat proyek irigasi, bangunan ini dilebur menyesuaikan dengan gambar proyek. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Joanyar dulunya adalah masyarakat yang kreatif dan seni.

Kedua versi cerita di atas dibuktikan dengan eksistensi Desa Joanyar saat ini yang terdiri dari 2 (dua) Desa Adat yaitu Desa Adat Joanyar Kajanan, dan Desa Adat Joanyar Kelodan, yang berada dalam satu Pemerintahan yaitu Desa Joanyar.

Nama Desa Joanyar mengalami beberapa kali perubahan yaitu dari awalnya, Jero Anyar, kemudian menjadi Jowanyar. Sekitar tahun 1970an nama Desa Jowanyar dirubah lagi menjadi Desa Joanyar.

### Sejarah

Terbentuknya Desa Joanyar sebagai wilayah komunitas adat diyakini terjadi sebelum tahun 1927. Namun demikian sebagai Desa Administratif (sebagai satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan adminstrasi dari pusat) dimulai sebelum tahun 1940an yang dibuktikan dengan pejabat Perbekel dari masa ke masa seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Nama- nama Pejabat Perbekel Desa Joanyar dari awal hingga sekarang

| **No** | **Nama** | **Masa Jabatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Guru Siden | ……...1940 |
| 2 | Ketut Badung | 1940 – 1942 |
| 3 | Made Lunga | 1942 – 1947 |
| 4 | Ketut Soweca | 1947 – 1953 |
| 5 | Nyoman Gede | 1953 – 1958 |
| 6 | Wayan Dana Darpati | 1958 – 1969 |
| 7 | Ketut Nesa | 1969 – 1976 |
| 8 | Wayan Maliarsa | 1976 – 1986 |
| 9 | Made Kaler (Pjs. Perbekel) | 1986 – 1989 |
| 10 | Nyoman Sedana | 1989 – 1996 |
| 11 | Made Sastra ( Pjs. Perbekel ) | 1996 – 1997 |
| 12 | Ketut Nadra | 1998 – 2000 |
| 13 | Made Sastra (Pjs. Perbekel) | 2000 – 2002 |
| 14 | Made Sutarjana Putra | 2002 – 2006 |
| 15 | Made Sastra ( Pjs. Perbekerl ) | 2007 – 2008 |
| 16 | Nyoman Wirasa | 2008 – 2008 |
| 17 | Made Sastra ( Pjs. Perbekel ) | 2008 – 2009 |
| 18 | Putu Suparma | 2009 – 2015 |
| 19 | I Made Mardika (Plt. Perbekel) | 2015 – 2015 |
| 21 | Ketut Wijaya | 2015 – 2021 |
| 21 | Nyoman Mas Nesa | 2021……… |

Sejarah pembangunan untuk kesejahtraan masyarakat Joanyar semenjak jaman reformasi dimulai maka banyak pembangunan yang telah dilaksanakan seperti Desa Joanyar menjadi salah satu pelaksana Program Pengembangan Kecamatan yaitu dari tahun 2003 sampai tahun 2007 yang dilanjutkan dengan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat yang tentunya baik fisik, Infrastruktur dasar dan peningkatan kwalitas dasar masyarakat telah banyak dicapai, disamping pembangunan yang di programkan dari pemerintah Propinsi, dan kabupaten khusunya program penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat. Pembangunan melalui swadaya cukup tinggi pembangunan di bidang sumberdaya manusia telah banyak di wujudkan seperti terbentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT), sektor ekonomi bergeraknya LPD dan di sektor pertanian dan perkebunan termasuk di sektor peternakan telah sering mengikuti lomba di tingkat kabupaten dengan adanya dana desa, alokasi dana desa lebih mendorong kegiatan-kegitan yang berbasis kemasyarakatan.

Beberapa peristiwa atau momen-momen penting yang telah terjadi di desa Joanyar, di antaranya beberapa lomba kegiatan tertentu baik lomba ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan di tingkat nasional, membuktikan bahwa masyarakat desa Joanyar mempunyai potensi yang cukup membanggakan. PKK Desa Joanyar paling sering (rajin) mengikuti lomba-lomba.

Dari kejuaraan yang diikuti membuahkan sederetan Piala maupun Piagam, diantaranya:

1. Lomba Desa di tahun 1980 an tingkat Provinsi dengan meraih Juara II
2. Lomba Gerak Jalan tingkat kecamatan tahun 1983 yang diikuti oleh Karang Tarun Kusuma Jaya meraih Juara I
3. Lomba Koor PKK pada jaman Orde Baru beberapa kali memperoleh juara
4. Lomaba Gerak jalan Tingkat Kecamatan Seririt, yang diikuti oleh PKK Juara I
5. Lomba Hari Gerak PKK, juara II tingkat Kabupaten
6. Lomba Keluarga Harmonis Tingkat Nasional tahun 2005, meraih Juara III
7. Lomba Subak tingkat Kabupaten, memperoleh Juara II
8. Lomba sapi Gerumbungan

## Kondisi Umum Desa

### F:\RPJM\PETA DESA.PNGPeta Desa Joanyar

Gambar 2. 1 Peta Desa Joanyar

### Letak geografis

Secara tofografi, Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 65 mdl diatas permukaan laut, curah hujan relative tinggi, yaitu 100-1.200 mm/ tahun dan suhu udara rata-rata mencapai 27-300C dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

* + Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangguwisia
  + Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalianget
  + Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rangdu
  + Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ringdikit/Bubunan

Luas wilayah Desa Joanyar 287 ha atau sekitar 4,75 % luas Kabupaten Buleleng (1366 ha). Secara administratif Desa Joanyar terbagi atas 2 ( dua ) Banjar Dinas/Dusun yang meliputi : Banjar Dinas Kajanan dan Banjar Dinas Kelodan. Adapun luas wilayah Desa Joanyar menurut penggunaannya sesuai profil desa tahun 2020 :

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KEGUNAAN LAHAN** | **LUAS**  **( Ha )** | **( % )** |
| 1 | Luas Pemukiman | 48,00 | 16,72 |
| 2 | Luas Persawahan | 145,00 | 50,52 |
| 3 | Luas Perkebunan | 71,07 | 24,75 |
| 4 | Luas Kuburan | 0,10 (perkiraan) | 0,03 |
| 5 | Luas Pekarangan | 14,23 | 4,95 |
| 6 | Luas Taman | Diprogramkan |  |
| 7 | Luas Pasilitas Umum | 8,70 | 3,03% |
| 8 | Perkantoran | 0,75 | 0, 26 |
| 9 | Lapangan Olah Raga | 0,04 | 0,01 |
| 10 | Bangunan Sekolah | 1,10 | 0,38 |
| 11 | Jalan | 3,75 | 1,31 |
| 12 | Aliran Listrik | 3,06 | 1,06 |
| Total Luas | | **287,10** | **100** |

Sumber : Profil Desa Joanyar Tahun 2020

### Demografi

Berdasarkan Registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah Penduduk Desa Joanyar pada tahun 2020 yaitu 3.499 jiwa. Adapun gambaran penduduk Desa Joanyar secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3 Jumlah penduduk Tahun 2020

| **NO** | **TINGKATAN PENDUDUK** | **JUMLAH**  **( Orang )** | **( % )** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Laki – laki | 1.794 | 51,27 |
| 2 | Jumlah Perempuan | 1.705 | 48,73 |
| Jumlah | | **3.499** |  |
| Jumlah KK | | **1.068** |  |
| 3 | Usia 0-12 Bulan | 49 | 1,40 |
| 4 | Usia 1-12 tahun | 536 | 15,32 |
| 5 | Usia 13-18 tahun | 304 | 8,69 |
| 6 | Usia 19-25 tahun | 325 | 9,29 |
| 7 | Usia 26-50 tahun | 1.175 | 33,58 |
| 8 | Usia 51-60 tahun | 406 | 11,60 |
| 9 | Diatas 60 tahun | 704 | 20,12 |
| Jumlah | | **3.499** |  |

Sumber : Profil Desa Joanyar Tahun 2020

Tabel 2. 4 Tenaga Kerja Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKATAN PENDUDUK** | **LAKI-LAKI**  **( Orang )** | **PEREMPUAN**  **( Orang )** | **JUMLAH**  **( Orang )** |
| 1 | Penduduk usia 18-56 tahun | 908 | 853 | 1.761 |
| 2 | Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 882 | 828 | 1.710 |
| 3 | Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 26 | 25 | 51 |
| 4 | Penduduk usia 0-6 tahun | 164 | 141 | 305 |
| 5 | Penduduk masih sekolah usia 7-18 tahun | 286 | 298 | 584 |
| 6 | Penduduk usia 56 tahun ke atas | 436 | 413 | 849 |
| 7 | Angkatan kerja | 908 | 853 |  |
|  | Jumlah | 1.794 | 1.705 |  |
|  | Jumlah total | 3.499 | | |

Sumber: Profil Desa Joanyar tahun 2020

Struktur penduduk menurut Usia, usia 0-12 bulan 1,40 %, usia 2-12 tahun 15,32%, usia 13-18 tahun 8,69%, usia 19-25 tahun 9,29%, usia 26-50 tahun 33,58%, usia 51-60 tahun 11,60 % dan diatas 60 tahun 20,12 %, untuk usia produktif usia 18–60 tahun 63,16 %, potensi sumber daya manusia yang produktif yaitu umur 18 tahun sampai 60 tahun cukup tinggi yaitu 63,16 % dari jumlah penduduk, ini modal dalam pembangunan di Desa Joanyar.

### Keadaan sosial

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dipunyai Desa Joanyar, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar dan menengah antara 7 tahun s/d 18 tahun yang sedang sekolah sebesar 17,89%, yang sudah tamat 76,48%, pendidikan tinggi 2,94%, pernah SD belum tamat sekolah 0,52%.

Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai modal dasar pembangunan di Desa Joanyar dari tingkat pendidikan diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Laki-laki**  **( Orang )** | **Perempuan**  **( Orang )** | **Jumlah**  **( Orang )** |
| 1 | Usia 3-6 yang belum masuk TK | 66 | 48 | 114 |
| 2 | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 24 | 23 | 47 |
| 3 | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 286 | 298 | 584 |
| 4 | Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Tamat SD/sederajat | 497 | 662 | 1.159 |
| 6 | Tamat SMP/sederajat | 191 | 143 | 334 |
| 7 | Tamat SMA/sederajat | 587 | 417 | 1.004 |
| 8 | Tamat D1/sederajat | - | - | - |
| 9 | Tamat D2/sederajat | - | - | - |
| 10 | Tamat D3/sederajat | 28 | 12 | 40 |
| 11 | Tamat S1/sederajat | 30 | 21 | 51 |
| 12 | Tamat S2/sederajat | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Tamat S3/sederajat | - | - | - |
| 14 | Tidak / Belum Sekolah | - | - | - |
| Jumlah | | 1720 orang | 1635 |  |
| **JUMLAH TOTAL** | |  |  | **3.355** |

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan tahun 2020

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa, sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian 42%, sektor swasta sebesar 5%, diikut oleh buruh tani 0,17%. Untuk usia produktif sebesar 58%, sedangkan non produktif 44% sedangkan sektor lain hanya sebagai sektor penunjang maka kalau dilihat dari kondisi geografis maka potensi dominan adalah perkebunan dan pertanian. Mengingat penduduk yang non produktif cukup tinggi maka kebijakan pembukaan lapangan kerja masih menjadi prioritas utama.

Tabel 2. 6 Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2020

| **No.** | **Jenis Pekerjaan** | **Laki-laki**  **(Orang)** | **Perempuan**  **(Orang)** | **Jumlah**  **(Orang)** | **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petani | 132 | 22 | 154 | 7,88 |
| 2 | Buruh tani | 197 | 101 | 298 | 15,25 |
| 3 | PNS | 26 | 18 | 44 | 22,52 |
| 4 | Pedagang keliling | - | 3 | 3 | 0,15 |
| 5 | Peternak | 31 | - | 31 | 1,58 |
| 6 | Montir | 5 | - | 5 | 0,25 |
| 7 | Bidan desa | - | 1 | 1 | 0,05 |
| 8 | Perawat suasta | 3 | 3 | 6 | 0,31 |
| 9 | Pembantu RT | - | 4 | 4 | 0,20 |
| 10 | POLRI | 6 | 1 | 7 | 0,36 |
| 11 | TNI | 6 | 1 | 7 | 0,36 |
| 12 | Pensiunan PTPPNSPNS/TNI/POLRI | 37 | 5 | 42 | 2,15 |
| 13 | Pengusaha kecil dan menengah | 11 | 10 | 21 | 1,07 |
| 14 | Dukun kampong terlatih | 10 | 2 | 12 | 0,61 |
| 15 | Seniman/artis | 3 | - | 3 | 0,15 |
| 16 | Karyawan perusahaan swasta | 302 | 206 | 508 | 26,00 |
| 17 | Pedagang | - | 30 | 30 | 1,53 |
| 18 | Perangkat desa/staf | 10 | 3 | 13 | 0,66 |
| 19 | Tukang jahit | 2 | 6 | 8 | 0,41 |
| 20 | Tukang rias | 1 | 1 | 2 | 0,10 |
| 21 | Satpam | 4 | - | 4 | 0,20 |
| 22 | Buruh harian lepas | 459 | 287 | 746 | 38,18 |
| 23 | Warung makan | 1 | 4 | 5 | 0,25 |
|  | **Jumlah** | **1246** | **708** |  |  |
|  | **Jumlah Total** |  |  | **1954** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | UsiaProduktif (15-55 th) |  |  | 2061 |  |
|  | Usia non produktif  TidakProduktif |  |  | 536 |  |
|  | Jumlah |  |  | **2597** |  |
|  | *Tingkat kesejahtraanmasyarakat* |  |  | *Miskin* |  |
|  | *MISKIN* |  |  | *354 KK* |  |
|  | *SEDANG* |  |  | *635 KK* |  |
|  | *KAYA* |  |  | *30 KK* |  |

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2020

### Kondisi Ekonomi

Struktur perekonomian Desa Joanyar didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak 50,52 % yaitu seluas 145 ha dari total penggunaan lahan desa seluas 287 ha, dari sektor perkebunan seluas 71,07 ha, dengan indikator unggulan berupa kebun kelapa seluas 23,01 ha, kebun pisang seluas 15,03 ha, kebun manga seluas 7,01 hadan kebun anggur hitam seluas 20 ha, kebun rambutan seluas2,00 ha, kebun sawo seluas 3,00 ha dan jambu air seluas 1,02 ha. Sektor ekonomi lain berupa peternakan dengan indikator unggulan seperti peternak itik 25 orang , peternak ayam kampong 750 orang, peternak ayam broiler 25 orang, peternak sapi 435 orang, peternak babi 346 orang dan peternak kambing 6 orang.

Beberapa sektor ekonomi lain yang tergolong pengembangan ekonomi dasar dan menonjol di samping sektor pertanian adalah, perdagangan berupa toko dan warung, industri rumah tangga berupa tenun, pengolahan/kerajinan tangan serta sektor pariwisata dan Sektor Jasa seperti tukang kayu, tukang jahit, tukang besi took serabutan dan suplay rebahan bangunan dan industri sedang berupa selip padi.

Pada sektor perdagangan masyarakat Desa Joanyar yang bermata pencaharian sebagai petani ditunjang dengan kelancaran menjual hasil pertanian. Sehingga perekonomian dapat berjalan karena sistim timbal balik dalam proses penjualan dan pembelian sering dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kelompok tani dan ternak merupakan sektor yang sangat berpotensi menjadi dorongan prekonomian masyarakat Joanyar karena sesuai potensi yang ada maka penguatannya terus dilakukan.

Perekonomian masyarakat cukup berjalan lancar karena ditopang oleh Lembaga Perekonomian yang ada di desa sehingga mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Pada sektor jasa, yang menonjol adalah tumbuhnya lembaga/institusi keuangan mikro berupa Koperasi, program CBD, LPD, BUM-Desa. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam perkebangan ekonomi desa secara keseluruhan. Adapun lembaga prekonomian yang ada di Desa Joanyar :

Tabel 2. 7 Lembaga Perekonomian

| No | Lembaga ekonomi | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kelompok tani / subak | 1 kelompok |
| 2 | Pedagang | 16 unit |
| 3 | LPD | 2 unit |
| 4 | BUM-Desa | 1 unit |
| 5 | Kelompok Simpan Pinjam “Bali Sejahtera” Program CBD | 1 unit |
| 6 | Pasar Desa | Dalam perencanaan |
| 7 | Desa Wisata | Dalam perencanaan |
| 8 | Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) | 2 kelompok |
| 9 | Industri material | 1 unit |
| 10 | Jasa (Tukang cukur, bengkel, tukang kompor, dll) | 17 unit |
| 11 | Industri kecil / rumah tangga (home industry ) | 15 unit |
| 12 | Kelompok perempuan (Dasa Wisma) | 47 kelompok |

Sumber : Profil Desa tahun 2020

Untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi budaya yang dimiliki, maka dipandang perlu untuk membuka pasar desa dan desa wisata serta potensi lain yang dimiliki Desa Joanyar, sehingga akan membawa dampak positif untuk perkembangan prekonomian desa seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

### Pembagian Wilayah Desa

Secara tofografi, Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 65 mdl di atas permukaan laut, curah hujan relatif tinggi berkisar antara 2000/3000 mm, dengan suhu 27-30 0C. Luas wilayah Desa Joanyar, 287 ha. Penggunaan lahan di wilayah Desa Joanyar, sekarang dipilah menjadi daerah pemukiman 48 ha, tanah sawah 145 ha, perkebunan/tegalan 71.07 ha, penggunaan lain-lain (fasilitas umum, pura, setra, jalan, lapangan dan sebagainya) seluas 7,95 ha dan sisanya lahan pekarangan seluas 14,23 ha. Adapun wilayah Desa Joanyar, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

* + Sebelah Utara berbatasan dengan DesaTangguwisia
  + SebelahTimur berbatasan dengan Desa Kalianget
  + Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rangdu
  + Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bubunan /Ringdikit.

Secara administratif Desa Joanyar dibagi menjadi 2 ( dua ) Banjar Dinas/Dusun yang meliputi Banjar Dinas Kajanan dan Banjar Dinas Kelodan. Banjar Dinas Kajanan terdiri dari 5 (lima) urakan sedangkan Banjar Dinas Kelodan terdiri dari 1 (satu) urakan.

## Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa Joanyar terdiri dari : Pemerintah Desa Joanyar, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKD), dan Lembaga Adat Desa ( LAD ).

### Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun Tahun 2014 tentang Desa maka sistem tata kelola pemerintahan seperti berikut. Pemerintah Desa diselenggarakan oleh *Perbekel* dan yang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat desa yang dimaksud:

* + 1. Sekretariat desa, dipimpin oleh sekdes yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu *Perbekel* dalam bidang administrasi pemerintahan paling banyak terdiri dari tiga bidang urusan.
    2. Pelaksana kewilayahan, merupakan unsur pembantu *Perbekel* dalam bidang satuan tugas kewilayahan yang dibantu oleh Kelian Banjar Dinas.
    3. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu *Perbekel* sebagai pelaksana tugas oprasional paling banyak terdiri dari tiga seksi.

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

* Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
4. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
5. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
6. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
7. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
8. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

* Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi:

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
4. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
5. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
6. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
7. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

* Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi :

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
4. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
5. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
6. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

* Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi :

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
4. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
5. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
6. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

* Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :

1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
5. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
6. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mengacu pada regulasi tersebut, Pemerintahan Desa Joanyar diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan komposisi satu Perbekel, satu Sekretaris Desa yang dibantu oleh tiga Kepala Urusan, tiga kepala seksi dan dua Kepala Kewilayahan (Kelian Banjar Dinas) sesuai dengan pembagian wilayah di Desa Joanyar. Adapun SOTK Desa Joanyar adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Joanyar**

PERBEKEL

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAAN

KEPALA SEKSI

PELAYANAN

SEKRETARIS DESA

KEPALA URUSAN

TATA USAHA DAN

UMUM

KEPALA URUSAN

KEUANGAN

KEPALA URUSAN

PERENCANAAN

KELIAN BANJAR DINAS KAJANAN

KELIAN BANJAR

DINAS KELODAN

NYOMAN MAS NESA

MADE PANCA

GEDE SANTIKA

KETUT BUDIASA

MADE WIJANA

I MADE DWI ARYA SAPUTRA

NI PUTU DEWI PEBRIYANTI

NYOMAN

PARTA WIRAWAN

MADE BAGIANA

Diagram 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Joanyar

### Badan Permusyawaratan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki fungsi;

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pada Pasal 32 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut;

1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada Pasal 60 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun  1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemsyarakatan desa;
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada Pasal 63 menyatakan BPD berwewenang;

1. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi.

Di Desa Joanyar, BPD berjumlah lima orang dengan komposisi tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan yang masing-masing diambil dari keterwakilan wilayah dan mengakomodasi keterlibatan perempuan Desa. Adapun struktur atau bagan kelembagaan BPD adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR BPD DESA JOANYAR**

KETUA

WAYAN TAMA

SEKRETARIS

PUTU DIANTARRASA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

MADE GELGEL SUSANTA

EVI DWI ANJASARI

MADE SERINING

Diagram 2. 2 Struktur BPD

### Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LKD dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Kabupaten.

Sesuai dengan Permendagri No. 18 tahun 2018, Pasal 3, bahwa : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat serta pembentukannya diatur dengan Peraturan Desa, dengan persyaratan :

1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berkedudukan di Desa setempat;
3. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
4. Memiliki kepengurusan yang tetap;
5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
6. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pada pasal 4 Permendagri No. 18 tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi :
2. Rukun Tetangga (RT)
3. Rukun Warga (RW)
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Karang Taruna
6. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya :
9. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
10. Kelompok Tani (POKTAN / GAPOKTAN)
11. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
12. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
13. Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam kegiatan pemberdayaan tertentu
14. Dan lain-lain.

Pengurus LKD dipilih secara musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus LKD disesuaikan dengan kebutuhan, secara umum terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang/seksi/divisi kegiatan. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Adapun struktur organisasi atau bagan kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di Desa Joanyar adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR KEPENGURUSAN LPM**

**KETUA**

NYOMAN ARJANA

**SEKRETARIS I** MADE DIKSA

**SEKRETARIS II**

PUTU SUDIANTA

**BENDAHARA I**

PUTU SINTANA

**BENDAHARA II**

LUH SULASTRINI

**BENDAHARA II**

I MADE INDRAWAN

**SEKSI**

**AGAMA, SENI DAN BUDAYA**

1. PUTU SUPARMA
2. NYOMAN JELADA
3. KETUT SUYASA
4. PUTU DODY SUARDIPA

**SEKSI**

**PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA**

1. PUTU ARIMBAWA
2. PUTU ARNAWA
3. NYOMAN SUMANG JONI GASTER
4. KETUT PASTIMA

**SEKSI**

**KAMTIBMAS**

1. MADE SUDIASA
2. KETUT KARTIKA
3. MADE ARIMBAWA
4. PUTU SUGIHARTANA

**SEKSI**

**PEMB. EKONOMI & LINGKUNGAN HIDUP**

1. PUTU METRA
2. NYOMAN MUDITA
3. MADE WIKERTA
4. PUTU SUARTA

**SEKSI**

**KESEHATAN, KB & KEPENDUDUKAN**

1. PUTU SUDARSANA
2. NYOMAN BADUNG
3. GEDE WILLYA KARGUNA
4. KETUT JULI ASTRAWAN

**SEKSI**

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KOMANG ARMAYANTI
2. NI MADE YULIASMINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. NI GUSTI AYU SUWENI

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 3 Struktur LPM

**STRUKTUR PKK**

**KETUA UMUM**

KOMANG ARMAYANTI

**SEKRETARIS I**

NI PUTU DEWI PEBRIYANTI

**SEKRETARIS II**

LUH HETY SWARNITI

**WAKIL KETUA**

KOMANG TIRTA SUMANDHI

**POKJA I**

Bidang :

* Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong

**KETUA**

MADE SERINING

**WAKIL KETUA**

NI NYOMAN MAHARTINI

**SEKRETARIS**

NYOMAN BUDIANI

**ANGGOTA**

KETUT SURIANI

**BENDAHARA I**

NI MADE YULIASMINI

**POKJA II**

Bidang :

* Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoprasi

**KETUA**

LUH TARININGSIH

**WAKIL KETUA**

MADE ARTINI

**SEKRETARIS**

KETUT NARIASIH

**ANGGOTA**

KETUT RUSSATIANI

**POKJA III**

Bidang :

* Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

**KETUA**

ARIEK EKA MARLINA

**WAKIL KETUA**

MADE PUTRINI

**SEKRETARIS**

LUH RIADI

**ANGGOTA**

KETUT KARUNI

**POKJA IV**

Bidang :

* Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Kesehatan

**KETUA**

LUH TAMAN

**WAKIL KETUA**

LUH RESIANI

**SEKRETARIS**

MADE SWARTINI

**ANGGOTA**

KETUT MINTEN

Diagram 2. 4 Struktur PKK

**STRUKTUR ORGANISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA**

**PERBEKEL**

NYOMAN MAS NESA

**KEPALA REGU PENGAMANAN**

PUTU SUGIHARTANA

**KEPALA REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGANAN**

KETUT KARTIKA

**KEPALA REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI**

NYOMAN ARTA BUDIANA

**KASI PEMERINTAHAN**

**KEPALA REGU DAPUR UMUM**

GEDE BENY JUNIARTA

**KEPALA REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN**

KETUT KARTIKA

**ANGGOTA**

1. NYOMAN SUTOTO
2. PUTU SUARTAYA
3. KETUT SUWECA
4. MADE WIDIADA
5. KETUT ARDITA
6. KETUT RISSUDIASA

**ANGGOTA**

1. NYOMAN MEITRAYASA
2. NYOMAN MUDITA
3. MADE GUNAWAN
4. PUTU DARMAWAN
5. KETUT SUDIARTA

**ANGGOTA**

1. PUTU SUASMIKA
2. PUTU PARMITA
3. KETUT SUDARMIKA
4. KETUT DWI SAPUTRA
5. MADE SUASTIKA

**ANGGOTA**

1. PUTU SUKAMENAKA
2. KETUT SUARTANA
3. MADE WIMBA
4. KETUT WIDIADA
5. KETUT REDITA
6. MADE WIDIASA

**ANGGOTA**

1. NYOMAN TASTRA WIBAWA
2. GEDE ASTIKA
3. NYOMAN SUBAGIA
4. MADE ERY SURIAWAN
5. KADEK AGUS SUDARMITA

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 5 Struktur LINMAS

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KELOMPOK TANI KEMBANG SARI**

**DESA JOANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS**

PUTU DARMINTO

**BENDAHARA**

MADE SUARDANA

**ANGGOTA KELOMPOK TANI**

**24 ORANG**

**PELINDUNG**

PERBEKEL JOANYAR

**KETUA KELOMPOK**

IDA PUTU DARMITA

**SEKSI KESWAN**

PUTU PASTIKA

**SEKSI PRODUKS**I

NYOMAN WIJASA

**SEKSI PEMASARAN**

KETUT ADNYANA

**SEKSI SAPRODI**

IDA PUTU SUASTIKA

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 6 Struktur Organisasi Kelompok Tani Kembang Sari

**STRUKTUR KOPERASI**

**“TANI TUMBUH MEKAR”**

**KARYAWAN**

I Made Lanus

**ANGGOTA**

**RAPAT ANGGOTA**

**PNGURUS**

1. Ketua : Putu Merta Buana
2. Sekretaris : Made Widiana
3. Bendahara : Putu Ciria

**PENGAWAS**

1. Gede Ranuh
2. Ketut Madra

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 7 Struktur Koperasi “Tani Tumbuh Mekar”

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KELOMPOK WANITA TANI**

**“DESA JOANYAR”**

**DESA JOANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS**

LUH TAMAN

**BENDAHARA**

LUH RESIANI

**A N G G O T A**

**25 ORANG**

**PENASEHAT**

PERBEKEL JOANYAR

**PENANGGUNG JAWAB**

NYOMAN PARTA WIRAWAN

MADE BAGIANA

**SEKBID**

**PENGADAAN**

MADE SUARJANI

**SEKBID PRODUKSI**

NYOMAN BUDIARTANI

**SEKBID**

**PEMASARAN**

LUH ARTINI

**SEKBID INFO + PENYULUHAN**

LUH SUDIATI

**KETUA**

NI MADE YULIASMINI

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 8 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani “Desa Joanyar”

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KELOMPOK WANITA TANI TERNAK**

**“MUNDUK SARI”**

**BANJAR DINAS KAJANAN, DESA JOANYAR**

**KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS**

LUH PASTINI

**BENDAHARA**

KETUT MUSTRINI

**A N G G O T A**

**PELINDUNG**

PERBEKEL JOANYAR

**KETUA**

MADE MARINI

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 9 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani Ternak “Munduk Sari”

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KELOMPOK LUMBUNG PANGAN**

**KEMBANG SARI**

**DESA JOANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS**

PUTU DARMINTO

**PEMBINA**

KOORD. BPP SERIRIT

**A N G G O T A**

**PELINDUNG**

PERBEKEL JOANYAR

**KETUA**

IDA PUTU BARNITA

**BENDAHARA**

MADESKARDANA

**SEKSI PERMODALAN**

KETUT ADNYA

**SEKSI PENGADAAN**

PUTU PASTIKA

**SEKSI PEMASARAN**

IDA PUTU SWASTIKA

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 10 Struktur Organisasi Kelompok Lumbung Pangan Kembang Sari

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KUBE “EKA CITA YASA KERTI”**

**BANJAR DINAS KELODAN, DESA JOANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS**

NYOMAN BUDA ARTA

**BENDAHARA**

KETUT RIMBAWAN

**A N G G O T A**

**7 ORANG**

**PENASEHAT**

PERBEKEL JOANYAR

**KETUA**

I NYOMAN JELADA, S.Pd

**SEKSI**

**PERANAN WANITA**

1. KETUT SURYANI
2. MADE ARTINI
3. LUH HETY SUWARNITI
4. PUTU ARDANI

Diagram 2. 11 Struktur Organisasi Kube “Eka Cita Yasa Kerti”

### Lembaga Adat Desa (LAD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan ha katas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus  dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

 Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
2. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Selanjutnya Lembaga Adat juga memiliki fungsi lainnya yaitu:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Lembaga Adat memiliki wewenang yang meliputi:

1. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
2. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
5. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa.
6. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/kota desa adat tersebut berada.

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kedua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dala rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
10. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang ditetapkan.
11. Membantu penyuratan awig-awig.
12. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

Lembaga adat Desa telah tertuang dalam [Undang-undang](https://pattae.com/tugas-dan-fungsi-lembaga-adat-menurut-uu-desa/) tahun 2015 tentang Desa yang mengatur tugas dan fungsinya. Ketentuan itu, tidak menghilangkan adat istiadat yang sudah terbangun sejak lama dalam suatu masyarakat.

Berbagai macam aturan desa juga tertuang dalam dokumen tersebut. Mulai dari penyelenggaraan pemilihan desa, hingga penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Suatu organisasi yang menangani aturan-aturan atau adat- istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat kampung/[Desa.](http://pattae.com/kenapa-desa-batetangnga-lebih-dikenal-sebagai-desa-kanang/)  Lembaga adat ini diluar dari struktur pemerintah Desa artinya, ia berdiri sendiri.

Bentuk lembaga tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Desa Nomor 15 tahun 2015 pasal 95 ayat (1). Berbunyi “*Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa*”.

Lembaga Adat Desa menjadi bagian tersendiri dalam memberikan tugas dan fungsi, mengembangkan adat istiadat suatu masyarakat desa. Sesuai UU, fungsinya terdapat pada pasal 95 ayat (2) yang berbunyi:

*“Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa”.*

Pada UU Desa tersebut,  menekankan bahwa fungsi adat dapat diselenggarakan sesuai hukum adat di Desa. Artinya, fungsi lembaga tersebut lahir dari kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Untuk tugasnya, dijelaskan dalam UU Desa pasal 95 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa”.*

Tugas-tugas daripada lembanga tersebut yaitu menjalankan aturan-aturan adat. Namun, [aturan adat](https://pattae.com/ketahui-syarat-menjadi-pemangku-adat-tomakaka/) tersebut tentunya tidak bertentangan dengan pemerintah Desa sebagai perwakilan Negara.

Lembaga Adat Desa yang ada di Desa Joanyar adalah Subak, PHDI, dan WHDI.

Kelembagaan di Desa Joanyar dituangkan dalam diagram dibawah ini.

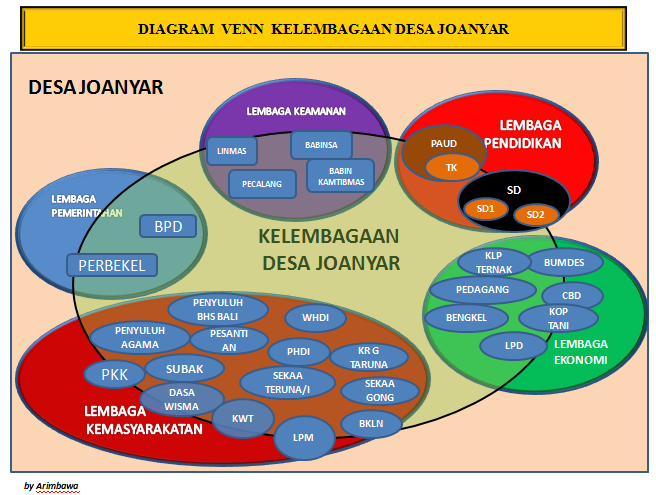


Diagram 2. 12 Diagram Venn Kelembagaan Desa Joanyar

## Dinamika Konflik

Dinamika konflik dalam konteks ini akan dibatasi pada pembahasan tentang peristiwa pertentangan yang pernah terjadi sehingga menimbulkan masalah baik secara individu maupun kelembagaan atau kelompok dalam hal kekuatan/kesenjangan hubungan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, kerentanan sosial, kesenjangan, kohesi sosial, inklusivitas, akuntabilitas, dan ketahanan masyarakat Desa Joanyar.

Ada sejumlah metode analisis konflik, namun pada kajian ini analisis konflik menggunakan metode: **Menjawab Pertanyaan**. Dengan metode ini suatu konflik akan dianalisis dengan jalan mengajukan sejumlah pertanyaan yaitu:

1. Siapa dengan siapa yang terlibat dalam konflik?
2. Apa yang menjadi isu konflik?
3. Dimana terjadinya konflik?
4. Bagaimana terjadinya konflik?
5. Apa sebab terjadinya konflik?
6. Sejauhmana tingkat konflik antara dua pihak?

Pembahasan analisis dinamika konflik dalam dokumen ini disederhanakan hanya menggunakan pertanyaan:1) Siapa dengan siapa yang terlibat dalam konflik?; 2)Apa yang menjadi isu konflik? dan 4) Bagaimana terjadinya konflik? Sehingga tabel analisisnya dibuat sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Analisis Dinamika Konflik Desa Joanyar

| **No** | **Pihak yang berkonflik** | **Materi konflik** | **Bagimana terjadinya konflik** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerintah Desa dengan LPM | Batas tugas dan fungsi TPK dengan LPM | Enam tahun terakhir LPM hampir tidak efektif difungsikan |
| 2 | Pengelola dengan Masyarakat | Pengelolaan Air Bersih (PAM Desa). | 1. Layanan air tidak merata;  2. Penggunaan air tanpa meter air (air gratis). |
| 3 | Perbekel dengan anggota masyarakat | Penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Menurut persepsi sekelompok masyarakat penentuan penerima BLT tidak memenuhi rasa keadilan/tidak tepat sasaran. |
| 4 | Adat Kajanan dengan Adat Kelodan | Kegiatan pengerupukan | Pernah terjadi gesekan antar pemuda. |
| 5 | Pemerintah Desa dengan Para Kelian Urakan | Honor | Dari enam tahun bahkan sebelumnya, para kelian urakan tidak mendapatkan honor operasional. |
| 6 | Desa Joanyar dengan Subak Pengaringan | Sampah di TPA | Sampah di TPA meluber sampai hanyut ke jaringan irigasi Subak Pengaringan |
| 7 | Perbekel dan Masyarakat | Rekrutmen staf pembantu perbekel | Kurangnya transparansi rekrutmen perangkat Desa (kejadian sekitar tahun 90an) |

## Masalah dan Potensi Desa Joanyar

Berdasarkan paparan tentang gambaran umum Desa Joanyar, mulai dari legenda dan sejarah desa, kondisi umum desa, kelembagaan desa, dan dinamika konflik; dapat dipotret tentang kelemahan, dan kekuatan semua sumber daya yang ada di Desa Joanyar. Kelemahan dipersepsikan sebagai masalah, sedangkan kekuatan dipersepsikan sebagai potensi yang akan dimanfaatkan untuk meminimalkan atau menanggulangi masalah tersebut.

Masalah dan potensi Desa Joanyar meliputi aspek pisik dan non pisik. Beranjak dari konsep Pembangunan (merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat), maka objek pembangunan harus diseimbangkan antara aspek pisik dan non pisik.

Jika direfleksi, ternyata terdapat banyak nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu/tokoh masyarakat Desa Joanyar yang patut diteladani, yang selama ini jarang ada yang mengangkat ke permukaan sebagai spirit dalam melaksanakan pembangunan desa.

Berikut disajikan tabel masalah dan potensi Desa Joanyar, dan secara naratif dideskripsikan nilai-nilai yang potensial untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Desa Joanyar ke depan.

Tabel 2. 9 Masalah dan Potensi Desa

| **No** | **Tipologi Desa** | **Masalah** | **POTENSI** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desa Tanpa Kemiskinan  SDGs Desa 1 :  Desa tanpa Kemiskinan  SDGs Desa 2 :  Desa tanpa kelaparan | 1. Belum validnya data desa 2. Jalan usaha tani belum memadai 3. Irigasi desa masih kurang baik, banyak kebocoran. 4. Sarana jalan desa, jalan lingkungan pemukiman belum memadai. | * 1. Struktur perangkat desa lengkap   2. Struktur BPD lengkap   3. Sarana kantor desa cukup memadai   4. Adanya kendaraan dinas roda dua   5. Tersedianya angkatan kerja yang memadai   6. Adanya buruh bangunan yang memadai   7. Tersedianya sarana irigasi   8. Tersedianya jalan usaha tani   9. Tersedianya jalan lingkungan |
| 2 | Desa Ekonomi Tumbu Merata  SDGs Desa 8 :  Pertumbuhan ekonomi merata  SDGs Desa 9 :  Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan  SDGs Desa 10 :  Desa tanpa kesenjangan  SDGs Desa 12 :  Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan | 1. Keterampilan masyarakat masih rendah dalam pengembangan UKM. 2. Modal usaha terbatas (UKM) 3. Perlindungan harga produksi pangan 4. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri. 5. Industri RT masih kurang | 1. Banyaknya kelompok tani dan ternak 2. Adanya kelompok budidaya ikan tawar 3. Adanya industri rumah tangga (garmen, Tenun, Anyaman bambu) 4. Adanya bengkel las dan sepeda motor 5. Adanya tenaga penjahit 6. Adanya LPD, Program CBD 7. Adanya BUM Desa 8. Adanya SUBAK desa 9. Kemitraan dengan JKR, BUMDes, KUT 10. Tersedia tenaga pengajar yang memadai 11. Tersedianya TPL; 12. Tersedianya tenaga Penggarap; 13. Tersedianya buruh tani; 14. Tersedianya lahan pertanian; 15. Tersedianya lahan perkebunan; |
| 3 | Desa Peduli Kesehatan  SDGs Desa 3 :  Desa sehat dan sejahtera  SDGs Desa 6 :  Desa layak air bersih dan sanitasi  SDGs Desa 11 :  Kawasan pemukiman aman dan nyaman | 1. Layanan kesehatan oleh lembaga yang ada di desa; 2. Sarana prasarana posyandu belum memadai; 3. PAM Desa masih sering bermasalah 4. Sanitasi lingkungan tidak baik 5. Belum optimalnya kerjasama antar pemerintahan desa dengan desa adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. | 1. Adanya anggota masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. 2. Adanya tempat POSYANDU 3. Adanya sumber mata air bersih dari Desa Bestala dan sumber bor di Banjar Dinas Kajanan 4. Terbentuknya Komunitas Pendonor Darah. 5. Adanya Linmas 6. Adanya Pecalang 7. Adanya Babinkamtibmas 8. Adanya Babinsa 9. Adanya Karang Taruna 10. Adanya PKK 11. Adanya Desa Adat |
| 4 | Desa Peduli Lingkungan  SDGs Desa 7 :  Desa berenergi bersih dan terbarukan  SDGs Desa 13 :  Desa tanggap perubahan iklim  SDGs Desa 15 :  Desa peduli lingkungan darat | 1. Masyarakat belum sadar akan pentingnya lingkungan bersih 2. Masih adanya masyarakat bakar sampah 3. Masih adanya masyarakat buang sampah ke selokan 4. Masih kurangnya pemanfaatan/pemeliharaan lahan untuk mendukung kesehatan/kelestarian lingkungan. | 1. Tersedianya alat angkutan sampah 2. Tersedianya lahan pengelolaan sampah (sedang dalam proses). 3. Adanya tenaga kebersihan 4. Adanya lahan persawahan 5. Adanya lahan perkebunan 6. Adanya masyarakat peduli lingkungan |
| 5 | Desa Peduli Pendidikan  SDGs Desa 4 :  pendidikan desa berkualitas | 1. Masih adanya anak putus sekolah di tingkat SD dan sekolah menengah 2. Jaringan internet yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan masyarakat/anak, 3. Kurangnya kegiatan pembinaan mental | 1. Adanya 2 (dua) Sekolah Dasar 2. Tercukupinya tenaga pengajar dari tingkat SD dan tingkat menengah 3. Adanya sarana pendukung seperti   internet Desa Dinas dan Desa Adat   1. Adanya beberapa kelompok seni dan budaya. 2. Adanya tenaga seni yang berkualitas |
| 6 | Desa Ramah Perempuan  SDGs Desa 5 :  Keterlibatan perempuan Desa | Kegiatan Dasa Wisma, PKK yang belum optimal | 1. Adanya kelompok PKK 2. Adanya kelompok wanita tani 3. Tersedianya tenaga pengajar wanita baik tingkat SD dan menengah |
| 7 | Desa Berjejaring  SDGs Desa 17 :  Kemitraan untuk pembangunan Desa | 1. Masih adanya beberapa masyarakat/anak pengangguran 2. Belum adanya mitra kerja desa untuk pemberdayaan masyarakat. | 1. Adanya Perusahaan (PT) yang masuk ke Desa Joanyar; 2. Dukungan sejumlah anggota masyarakat untuk mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak ke tiga. 3. Adanya sumur bor PDAM Buleleng yang terletak di Desa Joanyar; 4. Adanya penyosohan beras. 5. Adanya pelaba Desa pemberian dari Pemprov. Bali; |
| 8 | Desa Tanggap Budaya  SDGs Desa 16 :  Desa damai berkeadilan  SDGs Desa 18 :  Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif | 1. Belum efektifnya peran lembaga penyuluh agama; 2. Belum berfungsinya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa secara efektif; 3. Belum adanya tempat rekreasi yang mendukung pengembangan Desa Wisata; 4. Belum adanya regenerasi seni budaya dikalangan anak-anak muda; 5. Belum adanya wadah pembinaan seni; 6. Belum adanya sanggar seni; | 1. Adanya ruang pembinaan umat ketika persembahyangan bersama; 2. Adanya lokasi/tempat yang potensial untuk pengebangan objek wisata (Tembuku, Gerombangan); 3. Adanya lahan pertanian dan perkebunan yang memadai untuk pengembangan objek agro wisata; 4. Secara sejarah, Desa Joanyar merupakan Desa Seni. 5. Adanya sekeha kesenian 6. Adanya sekaa gong 7. Adanya sekaa angklung 8. Adanya sekaa gender 9. Adanya gong Desa 10. Adanya dalang (3 orang); |

Dari uraian di atas tentang Legenda dan Sejarah Desa Joanyar, dapat ditarik benang merahnya, berupa nilai-nilai luhur, terutama terkait dengan potensi yang ada pada masyarakat desa Joanyar yang dapat dijadikan aset pembangunan.

Adapun nilai-nilai potensial tersebut adalah :

1. Nilai semangat dan komitmen membangun desa

Desa Joanyar adalah termasuk desa baru (muda), setelah terpisah dari induknya yaitu Desa Kalianget. Desa Joanyar terbentuk atau berdiri disekitar awal abad ke-20. Jika merunut pada tahun pembangunan pura Desa Joanyar Kajanan yaitu tahun 1927 (tertulis/terpampang) di Paduraksa dan tembok pembatas Jaba Tengah dengan areal Jeroan Pura desa Adat Joanyar Kajanan, yang sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan menyelami peristiwa sejarah Desa Joanyar, maka pada saat itu warga (kerama desa kita) dengan kondisi ekonomi yang belum seberapa, pendidikan belum maju, secara politis berada dalam suasana memperjuangkan kemerdekaan, sarana prasarana khususnya transportasi jauh dari yang semestinya, masyarakat kita sudah mampu membangun pura yang begitu megahnya.

1. Nilai persatuan

Dengan keunikan heteroginitas sosio- cultural dan religiusitas yang meliputi adat kebiasaan, keyakinan yang berbeda (siwa raga) untuk masyarakat desa Adat Joanyar Kelodan dan sulinggih bagi masyarakat Desa Adat Joanyar Kajanan, bukanlah merupakan hambatan dan tantangan apalagi ancaman, melainkan ia merupakan aset yang memperkaya kasanah dan perbendaharaan bagi pembangunan desa Joanyar, dengan lain pernyataan ia merupakan unsur potensial desa.

Masyarakat Desa Joanyar adalah tergolong masyarakat yang permisif, toleran terhadap hal-hal yang menurut masyarakat Joanyar belum bisa menerima, mereka tidak cepat bergejolak, tidak arogan tetapi selalu menjaga dan menempatkan keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kedamaian di atas kepentingan pribadi dan golongan. Masih mengutamakan penyelesaian kekeluargaan, menyampaikan masalah kepada tetua (*pengelingsir)*, maupun kepada Lembaga Desa yang berkompeten.

Namun kondisi positif sikap mental masyarakat Joanyar yang membanggakan itu oleh oknum tertentu dipandang sebagai sesuatu sikap yang lemah, sehingga dulu ada istilah Joanyar *desa Luwa*.

1. Nilai Ketokohan para pemimpin pendahulu desa Joanyar

Desa Joanyar sangat bangga mempunyai tokoh-tokoh militan, bukan hanya dalam membangun memajukan desa tetapi juga punya latar belakang jiwa heroik, patriotik, kepahlawanan. Tokoh-tokoh pemimpin kita di Desa Joanyar bahkan ada yang mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional Kusuma Bangsa,seperti Made Lunga yang gugur ditangan penjajah Belanda bersama rekan-rekannya, diantaranya Made Tangi. Bahkan Made Lunga juga mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi, beliau juga menolong orang melahirkan dengan gunting dan alat seadanya. Tokoh yang lain adalah Perbekel Putu Dana Darpati, beliau hidup di tiga jaman. Berjuang pada jaman Belanda, Nika, Jepang bahkan saat beliau jadi Perbekel berhadapan dengan situasi gawat mencekam G.30 S/PKI. Perbekel yang lain yang mengalami jaman penjajahan semua sebagai pejuang melawan penjajah, sehingga di jaman kemerdekaan beliau mendapat penghargaan Veteran.

1. Nilai semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan masyarakat desa Joanyar

Beberapa peristiwa atau momen-momen penting yang telah terjadi di desa Joanyar, di antaranya beberapa lomba kegiatan tertentu baik lomba ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan di tingkat nasional, membuktikan bahwa masyarakat desa Joanyar mempunyai potensi yang cukup membanggakan. PKK Desa Joanyar paling sering (rajin) mengikuti lomba-lomba.

Dari kejuaraan yang diikuti membuahkan sederetan Piala maupun Piagam, diantaranya:

1. Lomba Desa di tahun 1980 an tingkat Provinsi dengan meraih Juara II
2. Lomba Gerak Jalan tingkat kecamatan tahun 1983 yang diikuti oleh Karang Taruna Kusuma Jaya meraih Juara I
3. Lomba Koor PKK pada jaman Orde Baru beberapa kali memperoleh juara
4. Lomaba Gerak jalan Tingkat Kecamatan Seririt, yang diikuti oleh PKK Juara I
5. Lomba Hari Gerak PKK, juara II tingkat Kabupaten
6. Lomba Keluarga Harmonis Tingkat Nasional tahun 2005, meraih Juara III
7. Lomba Subak tingkat Kabupaten, memperoleh Juara II.

Prestasi di atas merupakan para meter yang dapat dijadikan ukuran seberapa potensi yang dimiliki desa Joanyar, dan sekaligus merupakan kekuatan (strengths) dalam analisis SWOT, potensi yang lahir dari landasan kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, kerukunan dan saling menghargai.

1. Nilai seni budaya desa Joanyar yang hidup dan berkembang sejak dulu

Masyarakat desa Joanyar di tengah-tengah kesibukan mencari penghidupan tidak luput dari kegiatan berkesenian, baik seni tradisional maupun modern. Jiwa atau karakter seni yang dimiliki masyarakat desa Joanyar, nampak bukan saja pada kesenian profan, seni bali, seni Bebali maupun Bali-balian, namun juga nampak pada bangunan yang ada maupun yang pernah ada. Bangunan yang pernah ada misalnya Permandian Umum yang ada di ujung selatan kawasan desa Joanyar, begitu mengagumkan dan membanggakan selain indah dengan ornament ukiran patra Belanda, juga Nampak megah dengan pandilan singa yang terpampang pada tembok beton yang melengkung berbentuk parabola, di bawahnya dihidupkan aliran air mengalir diatas tembuku. Aliran air di pecah menjadi dua bagian (dua kamar), kamar yang sebelah kiri (timur) tertera tulisan “ TEMPAT MANDI WANITA” dan kamar yang sebelah kanan (barat) bertuliskan “ TEMPAT MANDI LAKI-LAKI”. Di tempat ini pula, di bagian hulu permandian sekaligus dijadikan tempat upacara penyucian atau Mebeji oleh masyarakat desa Joanyar terkait upacara Dewa Yadnya. Namun sayang bangunan kebanggan ini sekarang sudah tidak utuh lagi, karena bagian kamar maupun bangunan ornament ukiran diubah/dipugar pada waktu ada proyek irigasi subak Joanyar tahun 1980 an.

Potensi Seni bangunan yang lain Nampak pada hiasan atau ornament pada pura-pura yang ada di wilayah desa Joanyar.

Sementara dalam seni Bebali sekaligus Balih-balihan yang sampai saat ini masih ada dan terpelihara dengan baik, yakni seni Barong. Seni barong Macan konon yang dibuat oleh orang asli masyarakat Joanyar, Ketut Lantik. Dahulu pementasan Barong disertai dengan tari topeng maupun bebondresan. Seni Barong adalah seni tradisional yang amat langka khususnya di wilayah Buleleng. Ini menandakan Masyarakat desa Joanyar selain seni dalam sesolahan tetapi juga kreatif berkesenian. Kreatif artinya mau dan mampu membuat instrument seni. Selain untuk tontonan Seni Barong juga terkait pula dengan upacara keagamaan di pura atau tri Kahyangan khususnya desa Adat Joanyar Kajanan dan diyakini mempunyai kekuatan magis religious.

Pernah juga berdiri Sanggar Drama Gong sekitar Tahun 1970an yang cukup dikenal dan pentas di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Seririt.

1. Adanya Nilai-nilai manajemen keorganisasian yang kental pada masyarakat Joanyar

Adanya nilai-nilai manajemen keorganisasian yang kental pada masyarakat Joanyar, Nampak pada banyaknya terbentuk organisasi tradisional (Sekaa). Mulai dari sekaa Manyi, Sekaa Semal, Sekaa Jongkok, Sekaa Mamula dan yang lainnya. Ini merupakan nilai yang patut dipertahankan. Nilai hidup dalam kebersamaan.

1. Organisasi Pencak Silat Cimande

Organisasi Pencak Silat Cimande sudah berkembang sejak dulu kala. Organisasi ini mampu mengembangkan pembinaan mental anggotanya antara lain jiwa/nilai-nilai seni, melatih sportifitas, percaya diri, kesetiakawanan, dan sarana berolahraga.

# BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA JOANYAR

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa Joanyar Perbekel menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa Joanyar dengan mengikut sertakan unsur masyarakat Desa dan mempertimbangkan kondisi objektif Desa Joanyar serta prioritas program dan kegiatan Kabupaten Buleleng.

Adapun langkah kegiatan penyusunan RPJM Desa Joanyar dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan, yaitu: 1. Sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJM Desa Joanyar, 2. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten Buleleng, 3. Penyusunan rancangan RPJM Desa Joanyar, 4. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Joanyar, 5. Musdes Rancangan RPJM Desa Joanyar, 6. Musyawarah BPD, dan 7. Sosialisasi Perdes tentang RPJM Desa Joanyar.

Secara skematik tahapan mekanisme penyusunan RPJM Desa disajikan pada Gambar berikut.

Sosiaisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

1. Penyelarasan Visi Misi Perbekel dengan Visi Misi Kab Buleleng
2. Mempelajari dan mengkaji Peta SDGS Desa
3. Mempelajari dan mengkaji Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa lewat Banjar Dinas ( Musyawarah Banjar Dinas )

Musrenbang Desa Pembahasan RPJMDesa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Musdes Rancangan RPJMDesa

Musyawarah BPD

Sosialisasi Perdes tentang RPJM Desa

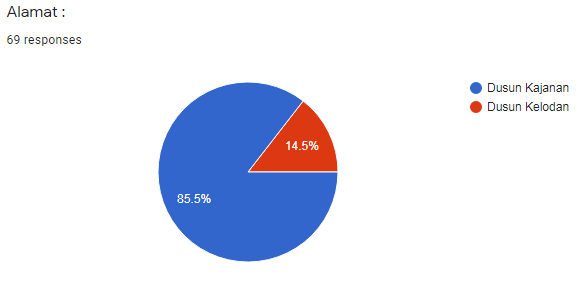
Gambar 3. 1 Tahapan Mekanisme Penyusunan RPJM Desa

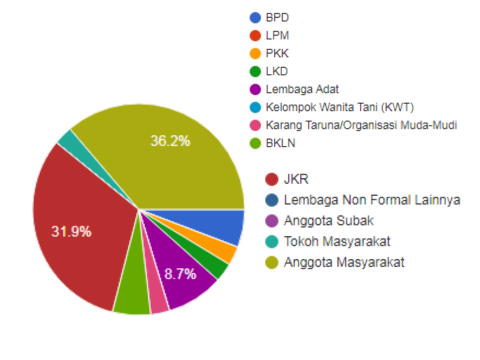
Dalam penyusunan RPJM Desa Joanyar periode tahun 2022-2027, menerapkan 5 (lima) pendekatan :

1. Pendekatan *Bottom –UP* : Pendekatan perencanaan pembangunan menurut jenjang pemerintahan dari bawah (Aspirasi dari tingkat urakan, Banjar Dinas/Dusun, Tingkat Desa)
2. Pendekatan Top-Down : Pendekatan perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari atas. (PendekatanSDGs dan kebijakan Kabupaten)
3. Pendekatan Politis : Pendekatan perencanaan pembangunan dilaksanakan dari penjabaran janji – janji politik perbekel yang dituangkan dalam ; Visi, Misi, Tujuan dan semboyan “ MATANGI”.
4. Pendekatan Teknokratis : Pendekatan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang kompeten (Kajian sistem air bersih di Desa Joanyar oleh Tim LP2M UNUD Dps).

( Terlampir )

1. Pendekatan Partisipatif : Pendekatan perencanaan pembangunan dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan di Desa Joanyar, baik warga masyarakat yang berdomisili di desa maupun yang di luar Desa Joanyar dengan mengguanakan metode : isian link Google-Form. dengan hasil sebagai berikut.





Gambar 3. 2 Hasil Pendekatan Partisipatif melalui *Google Form*



Gambar 3. 3 Pendekatan Perencanaan Pembangunan

## Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Joanyar

Dalam penyusunan RPJM Desa Joanyar periode tahun 2022-2027, Perbekel Joanyar melaksanakan sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Joanyar yang dilaksanakan pada hari :

Tanggal 11 Februari 2022 bertempat di Aula kantor Desa Joanyar, dihadiri oleh : BPD, Staf Pemerintah Desa, LKD, LAD, Pendamping lokal Desa dan unsur terkait.

Perbekel Desa Joanyar membentuk tim penyusun RPJM Desa Joanyar yang terdiri dari 11 orang :

1. Perbekel selaku pembina;
2. Ketua
3. Sekretaris
4. 8 anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga Adat dan unsur masyarakat lainnya.

Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Joanyar (SK terlampir).

(Dokumen Sosialisasi dan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Joanyar)

## Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan programdan kegiatan pembangunan kabupaten Buleleng dengan pembangunan Desa Joanyar. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan / atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten Buleleng. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten antara lain meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Buleleng
2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten Buleleng yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi : Penyelarasan Visi, Misi Perbekel dengan Visi, Misi Kabupaten Buleleng, Mempelajari dan mengkaji Peta SDGS Desa, Mempelajari dan mengkaji Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa dan Pengkajian Keadaan Desa lewat Banjar Dinas ( Musyawarah Banjar Dinas )

### Penyelarasan Visi Misi Perbekel dengan Visi Misi Kab Buleleng

Tabel 3. 1 Penyelarasan Visi Misi Perbekel dengan Visi Misi Kab Buleleng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | VISI/MISI PERBEKEL | VISI.MISI PEMKAB. BULELENG | Penyelarasan | | Rumusan penyelarasan visi/misi |
| Aspek yang selaras | Aspek yang kurang selara**s** |
| A | VISI  Bangkit Bersama Membangun Joanyar menuju Desa Mandiri Berdasarkan Tri Hita Karana | Terwujudnya masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdayasaing berlandaskan Tri Hita Karana | 1. Desa Mandiri 2. Landasan Tri Hita Kita | - | Terwujudnya Desa Joanyar menjadi Desa Mandiri Berlandaskan Tri Hita Karana |

| No | VISI/MISI PERBEKEL | VISI.MISI PEMKAB. BULELENG | Penyelarasan | | Rumusan penyelarasan visi/misi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek yang selaras | Aspek yang kurang selaras |
| B | MISI |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel | 1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif | I dengan 4 |  | I dengan 4 |
| 2 | Menigkatkan kualitas pelayanan publik | 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah | II dengan 6 |  | II dengan 6 |
| 3 | Menigkatkan infrasturktur Desa | 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional berbudaya dan berintegritas | III dengan 1, 8 |  | III dengan 1, 8 |
| 4 | Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan | 1. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan | IV dengan 2 |  | IV dengan 2 |
| 5 | Meningkatkan pelestarian adat, agama, dan seni budaya | 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan public | V dengan 3 |  | V dengan 3 |
| 6 | Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat | 1. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (sustainable development) | VI dengan 5, 7 |  | VI dengan 5, 7 |
| 7 | Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup |  |  |  |  |
| 8 | Meningkatkan interaksi antar lembaga yang ada di desa baik lembaga formal dan non formal; |  |  |  |  |

### Mempelajari dan mengkaji Peta SDGS Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunanDesa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapanbelas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

* 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

* 1. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa10 : desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

* 1. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

* 1. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

* 1. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

* 1. Desa ramah perempuan

SDGs Desa5 : keterlibatan perempuan Desa

* 1. Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

* 1. Desa tanggap budaya

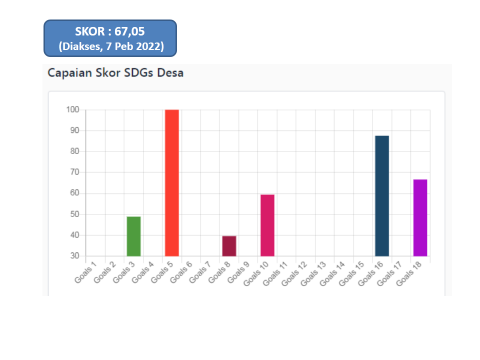
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Kondisi SDGs Desa Joanyar saat ini ( terlampir )







Gambar 3. 4 Hasil Capaian Skor SDGs Desa Joanyar

SDGS Desa Joanyar baru terpenuhi :

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera : 48,94

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa : 100

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata : 39,67

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan :59,46

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan : 87,58

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif : 66,67

SDGs yang belum terdata.

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut;

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

### Mempelajari dan mengkaji Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa

Bidang-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun cakupan dari kegiatan tersebut meliputi:

(Lampiran Program dan Kegiatan)

### Pengkajian Keadaan Desa lewat Banjar Dinas ( Musyawarah Banjar Dinas )

Pengkajian keadaan desa adalah proses pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara jelas dan terperinci. Pelaksana kegiatan adalah Tim Penyusun RPJM Desa. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi, potensi desa, kebutuhan prioritas dari warga masyarakat. Pengkajian keadaan desa dilakukan melalui tahapan kegiatan-kegiatan berikut ini.

Gambar 3. 5 Tahapan Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa, kajian desa perlu dilakukan secara partisipatif.

1. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

* 1. Pengambilan data dari dokumen data desa;
  2. Pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

1. Penggalian Gagasan Masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat antara lain: Tokoh adat/LAD, Tokoh masyarakat, Tokoh pendidikan, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan kelompok perajin, Perwakilan kelompok perempuan dan Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

1. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:

1. Data desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

## Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Penyusunan rancangan RPJM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tim penyusun RPJM Desa Joanyar menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara yang dihasilkan dari musyawarah desa, musyawarah Dusun, dan penggalian informasi dari masyarakat.
2. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
3. Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM.
4. Berita acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Perbekel Desa Joanyar
5. Perbekel Desa Joanyar memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
6. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Perbekel Desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
7. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
8. Musdes Rancangan RPJM Desa oleh BPD
9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang RPJM Desa yang diajukan Perbekel

(Dokumen Kegiatan Penyusunan RPJM)

## Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa Joanyar Periode Tahun 2022 – 2027

Pemerintah/Perbekel Desa Joanyar menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Pada Musrenbang Desa dilaksanakan diskusi terarah dan mendalam terhadap Rancangan RPJM Desa, yang meliputi semua substansi Rancangan RPJM Desa Joanyar untuk jangka waktu 6 (enam) tahun serta perkiraan pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa Joanyar.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terdiri atas: Tokoh adat/LAD, Tokoh masyarakat, Tokoh pendidikan, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan kelompok perajin, Perwakilan kelompok perempuan;Perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak dan Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

## Musdes Rancangan RPJM Desa Joanyar Periode Tahun 2022-2027

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terarah untuk membahas sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa,
5. Kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.

## Musyawarah BPD

BPD melaksanakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang RPJM Desa yang diajukan Perbekel, BPD melaksanakan pencermatan terhadap substansi Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Joanyar.

BPD mengundang Pemdes untuk rapat gabungan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM desa Joanyar.

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Perubahan RPJM Desa

Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

* 1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa

## Sosialisasi Perdes tentang RPJM Desa Joanyar

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan sosialisasi Perdes tentang RPJM Desa Joanyar pada masyarakat dan pihak terkait.

Sosialisasi dilaksanakan melalui forum pertemuan-pertemuan PKK di Desa, pertemuan-pertemuan pada Banjar – Banjar Dinas, melalui media yang ada di Desa dan atau melalui Sistem Informasi Desa, website Desa, FB, WA.

Sarana sosialisasi dapat dilakukan melalui: baliho; papan informasi Desa; media elektronik; media cetak; media sosial; website Desa; selebaran (leaflet); pengeras suara di ruang publik; dan media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

# BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF

## Visi Perbekel

Visi Perbekel Desa Joanyar periode 2022 sampai dengan 2027 adalah:

**TERWUJUDNYA DESA JOANYAR MENJADI DESA MANDIRI**

**BERLANDASKAN PADA TRI HITA KARANA**

Makna dari Visi tersebut adalah:

1. **Desa Mandiri** adalah **desa** yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Desa Mandiri adalah merupakan status desa yang tertinggi dalam pengembangan desa dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), desa dapat diklasifikasikan menjadi 5 status yakni:

1. Desa Sangat Tertinggal (IDM < 0,4907)
2. Desa Tertinggal (IDM: 0,4907 – 0,5989)
3. Desa Berkembang (IDM: 0,5989 - <0,7072)
4. Desa Maju (IDM: 0,7072 – 0,8155)
5. Desa Mandiri (IDM > 0,8155)

Dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Joanyar termasuk status IDM dengan kriteria “ Desa Berkembang”, dengan nilai IDM = 0,6502. Peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sebesar 0,0571 (Sumber: Sistem Informasi Desa, diakses tanggal: 7 Pebruari 2022).

Jadi Visi diatas menyatakan tekad dan keinginan untuk meningkatkan status Desa dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri.

1. Berlandaskan Tri Hita Karana maknanya adalah menjadikan filosofi Tri Hita Karana (tiga penyebab terjadinya kebahagiaan) sebagai landasan dalam mewujudkan visi di atas yaitu: adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam dan isinya.

Berdasarkan pengertian Desa Mandiri di atas, indikator-indikator ketercapaian Visi dinyatakan sebagai berikut:

1. Terhapusnya kemiskinan masyarakat secara tuntas;
2. Terhapusnya kelaparan bagi masyarakat secara tuntas;
3. Tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik;
4. Terjaminnya kehidupan yang sehat, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
5. Terjaminnya pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata;
6. Terpenuhinya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
7. Terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif, dan berkelanjutanan;
8. Terjaminnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
9. Tersedianya infrastruktur yang memadai;
10. Terselenggaranya layanan umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
11. Terwujudnya masyarakat yang inklusif dan damai;
12. Terbangunnya Kelembagaan Desa yang efektif, akuntabel dan inklusif;

Sebagai spirit guna mendorong ketercapaian Visi di atas maka Perbekel mengembangkan **Motto**, yang dijadikan nilai-nilai dalam setiap gerak dan langkah pelaksanaan pembangunan. Moto pembangunan Perbekel adalah :

**MATANGI**

Menurut Kamus Bahasa Bali- Indonesi (Dinas Pendidikan Dasar Dati I Bali, 1991), Matangi berarti bangun.

MATANGI sekaligus merupakan akronim dari: Mandiri, Adaptif, Transparan, Akuntabel, Nyaman, Gotong Royong, Inovatif.

Makna masing-masing nilai di atas sebagai berikut:

1. Mandiri maksudnya tidak ketergantungan. Kondisi ini terjadi apabila masyarakatnya selalu melakukan refleksi terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan prilakunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Adaptif maksudnya bersifat mudah menyesuaikan diri. Di tengah pergeseran dan perubahan yang sangat cepat maka semua komponen pembangunan diharapkan mempunyai adaptibilitas dan agilitas yang cukup. Program-program pembangunan yang dijalankan hendaknya dibuat relevan dengan perkembangan zaman.
3. Transparan maknanya jelas, terang, jernih. Program-program pembangunan di desa dilaksanakan dengan jelas mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.
4. Akuntabel maknanya bertanggungjawab. Perencanaan, proses dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.
5. Nyaman maknanya diarahkan pada kondisi lingkungan baik lingkungan kerja, maupun lingkungan desa yang damai, inklusif, menyenangkan.
6. Gotong Royong dimaknai sebagai sikap dan prilaku yang mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ada tiga elemen kunci dalam nilai gotong royong yaitu:
7. **Kolaborasi:** bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain.
8. **Kepedulian:** memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial.
9. **Berbagi:** memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat.
10. Inovatif maknanya selalu berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan (bersifat pembaharuan). Dalam menjalankan pembangunan dibutuhkan nilai-nilai, proses, atau cara-cara baru untuk bisa mencapai hasil yang maksimal.

## Misi Perbekel

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut di atas, Perbekel Desa Joanyar terpilih masa bakti 2021-2027 telah menyusun sejumlah Misi yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan infrasturktur Desa;
4. Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan;
5. Meningkatkan pelestarian adat, agama, dan seni budaya;
6. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat;
7. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Meningkatkan interaksi antar lembaga yang ada di desa baik lembaga formal dan non formal.

## Arah Kebijakan Pembangunan Desa Joanyar

Untuk memudahkan pencapaian tujuan, perlu dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang digunakan oleh para penyelenggara pembangunan dan pemangku kepentingan sebagai panduan atau pedoman umum sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Joanyar periode 2022 sampai dengan 2027 adalah arah kebijakan secara umum yang didasarkan pada tipologi desa dan data SDGs Desa, yang masih bisa dijabarkan lebih operasional lagi pada masing-masing program.

Visi Perbekel Joanyar adalah “*Terwujudnya Desa Joanyar Menjadi Desa Mandiri Berlandaskan Pada Tri Hita Karana*”. Dalam upaya mencapai Visi tersebut diatas, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan Desa yang terkait dengan delapan misi yang telah dirumuskan, ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1 Hubungan antara Tipologi Desa, SDGs dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| **No** | **Misi** | **Tipologi Desa/SDGs** | **Arah Kebijakan Pembangunan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;  SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan | 1. Meningkatkan validitas data desa;   Data memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan, maupun dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karenanya akan selalu diupayakan pemenuhan data yang baik (data yang *up to date*, beragam, jumlah yang memadai, dan mampu diakses secara cepat).   1. Pembudayaan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data;   Menjadikan budaya dan komitmen semua pihak menjadikan data sebagai sumber informasi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Joanyar. Patut dihindari perencanaan pembangunan dimulai dari informasi.   1. Meningkatkan ketahanan pangan;   Berdasarkan data yang valid pemerintah Desa Joanyar akan lebih akurat mengetahui potensi Desa dalam upaya pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan;   1. Pola pelaksanaan pembangunan pisik, sebesar-besarnya diupayakan dalam bentuk padat karya; |
| 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Desa peduli kesehatan  SDGs Desa : 3 Desa sehat dan sejahtera;  SDGs Desa : 6 Desa layak air bersih dan sanitasi;  SDGs Desa : 11 Kawasan permukiman aman dan nyaman | 1. Desa bebas stunting;   Pemantauan terhadap prevalensi stunting dilakukan melalui pencatatan tinggi dan berat badan balita di kegiatan posyandu.   1. Revitalisasi PAM Desa serta menjadikannya sebagai tulang punggung Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Optimalisasi kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Desa Adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui program SiPanduBerAdat.   Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SiPanduBerAdat) merupakan program Pemerintah Provinsi Bali untk menjalin harmonisasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa Adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. |
| 3 | Meningkatkan infrasturktur Desa | Desa peduli pendidikan  SDGs : 4 Pendidikan Desa berkualitas | 1. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa Adat untuk meningkatkan literasi dan numerasi masyarakat; 2. Bebas dari putus sekolah.   Melakukan mitigasi terhadap anak-anak usia sekolah yang potensial mengalami putus sekolah;   1. Pengembangan diklat keterampilan, ceramah, penyuluhan (karakter, kompetensi, dan literasi) dengan memprioritaskan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa dan/atau pihak ke tiga. |
| 4 | Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan | Desa ekonomi tumbuh merata  SDGs Desa:8 Pertumbuhan ekonomi merata;  SDGs Desa : 9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  SDGs Desa : 10 Desa tanpa kesenjangan  SDGs Desa : 12 Konsumsi dan produksi; Desa sadar lingkungan; | 1. Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif; 2. Prioritas pembangunan diarahkan pada masalah/isu sentral yang sekaligus mencerminkan jumlah penerima manfaat dari program pembangunan tersebut.   Pembangunan mestinya mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Untuk itu pembangunan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kebutuhan dan harapan masyarakat tercermin dari seberapa banyak materi pembangunan itu diusulkan oleh masyarakat, dan sekaligus juga mencerminkan besarnya populasi yang akan menerima dampak/manfaat pembangunan tersebut. Dengan kebijakan ini berdampak pada semakin mengecilnya kesenjangan-kesenjangan yang ada di desa;   1. Memaksimalkan penggunaan produk lokal desa yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. |
| 5 | Meningkatkan pelestarian adat, agama, dan seni budaya | Desa tanggap budaya  SDGs Desa : 16 Desa damai berkeadilan;  SDGs Desa : 18 Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif | 1. Melakukan rintisan Desa Wisata berbasis budaya dan lingkungan; 2. Melakukan pemberdayaan Kelembagaan Desa yang relevan dengan perkembangan zaman dalam rangka menjawab tantangan perubahan yang sangat dinamis. |
| 6 | Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat | Desa ramah perempuan  SDGs Desa : 5 Keterlibatan perempuan Desa | 1. Revitalisasi Organisasi Perempuan; 2. Memberikan ruang bagi perempuan secara proporsional dalam setiap aktivitas pembangunan di desa Joanyar dengan mempertimbangkan harkat, dan martabatnya. |
| 7 | Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Desa peduli lingkungan  SDGs Desa : 7 Desa berenergi bersih dan terbarukan;  SDGs Desa : 13 Desa tanggap perubahan iklim;  SDGs : 14 Desa peduli lingkungan laut;  SDGs : 15 Desa peduli lingkungan darat. | 1. Semua Kepala Keluarga berlangganan listrik PLN; 2. Meningkatkan kesadaran, dan prilaku masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik; 3. Melakukan perlindungan terhadap satwa;   Pembuatan Rancangan Perdes tentang perlindungan satwa bersama dengan BPD;   1. Penguatan inplementasi Danu Kerti.   Secara konsisten merawat dan menjaga kebersihan saluran air, kali (telabah/irigasi) agar bebas dari sampah dan kotoran; |
| 8 | Meningkatkan interaksi antar lembaga yang ada di desa baik lembaga formal dan non formal | Desa berjejaring  SDGs Desa : 17 Kemitraan untuk pembangunan Desa | Mengembangkan jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah atau suasta dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. |

## Arah Kebijakan Keuangan Desa Joanyar

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Joanyar meliputi: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

### Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan Desa Joanyar 6 (enam) tahun ke depan diarah kepada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang masih memungkinkan diperoleh seperti: pengelolaan Air Bersih Desa baik yang bersumber dari Desa Bestala maupun dari sumur bor, pengelolaan hasil dari tanah pelaba desa, bantuan dari pihak ke tiga (CSR dari PDAM Buleleng, Penyosohan Padi, Garmen), dan lain-lain yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Belanja Desa

Kebijakan Pemerintah Desa pada aspek Belanja Desa diarahkan pada pengembangan Standar Operasional Prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini menjadi penting karena untuk lebih menjamin kepastian pelaksanaan kegiatan, dan juga menyangkut efisiensi dan efektifitas kegiatan.

### Pembiayaan Desa

Berdasarkan data pada tahun sebelumnya hampir setiap tahunnya terdapat SiLPA. Hal ini kemungkinan penyebabnya antara lain kurangnya akurasi penganggaran belanja, program yang kurang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Namun dari data yang ada lebih dominan disebabkan oleh kurang akurasi anggaran di perencanaan program. Untuk itu ke depan Pemerintah Desa berupaya untuk menekan terjadinya SiLPA bahkan mengupayakan SiLPA=0; hal ini berarti efektifitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Disamping itu untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, pemerintah desa akan melaksanakan audit internal secara berkala yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Perbekel Desa Joanyar.

## Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Joanyar untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 4. 2 Program Indikatif**

| Kode | | | Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan | Perkiraan Volume dan satuan | Target Kinerja | Prakiraan Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | | | *b* | *c* | *d* | *e* |
| 1 |  |  | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  |  |  |
| 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 72 Bulan | 6 tahun | 452.520.000,00 |
| 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 648 OB | 6 tahun | 2.160.360.000,00 |
| 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 720 OB | 6 tahun | 9.716.112,00 |
| 1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 72 Bulan | 6 tahun | 466.853.448,00 |
| 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 360 OB | 6 tahun | 243.000.000,00 |
| 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | 72 Bulan | 6 tahun | 47.062.500,00 |
| 1 | 1 | 99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 72 Bulan | 6 tahun | 108.000.000,00 |
| 1 | 2 |  | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |  |  |  |
| 1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 72 Bulan | 6 tahun | 149.150.000,00 |
| 1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6 unit | 6 tahun | 205.086.300,00 |
| 1 | 2 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6 unit | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 1 | 3 |  | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |  |  |  |
| 1 | 3 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 10.944.000,00 |
| 1 | 3 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 114.402.100,00 |
| 1 | 3 | 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 72 Bulan | 6 tahun | 131.000.000,00 |
| 1 | 3 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 Kegiatan | 6 tahun | 31.250.000,00 |
| 1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 6 Paket | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 1 | 4 |  | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |  |  |  |
| 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 12 Kegiatan | 6 tahun | 57.100.000,00 |
| 1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 6 Paket | 6 tahun | 28.390.000,00 |
| 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 48.604.000,00 |
| 1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 18 Kegiatan | 6 tahun | 44.316.000,00 |
| 1 | 4 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 72 Bulan | 6 tahun | 30.000.000,00 |
| 1 | 4 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 9 Dokumen | 6 tahun | 20.000.000,00 |
| 1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 72 Bulan | 6 tahun | 22.250.000,00 |
| 1 | 4 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 72 Bulan | 6 tahun | 138.000.000,00 |
| 1 | 4 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | 7 Kegiatan | 5 tahun | 200.000.000,00 |
| 1 | 4 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 6 Paket | 6 tahun | 250.000.000,00 |
| 1 | 5 |  | Sub Bidang Pertanahan |  |  |  |
| 1 | 5 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 2 Dokumen | 2 tahun | 125.000.000,00 |
| 1 | 5 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 125.000.000,00 |
| 1 | 5 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 6 orang | 6 tahun | 31.250.000,00 |
| 1 | 5 | 04 | Mediasi Konflik Pertanahan | 6 Kasus | 6 tahun | 31.250.000,00 |
| 1 | 5 | 05 | Penyuluhan Pertanahan | 6 Kegiatan | 6 tahun | 31.250.000,00 |
| 1 | 5 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 125.000.000,00 |
| 1 | 5 | 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa | 1 unit | 1 tahun | 125.000.000,00 |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | 5.711.754.460,00 |
| 2 |  |  | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |  |  |  |
| 2 | 1 |  | Sub Bidang Pendidikan |  |  |  |
| 2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 72 Bulan | 6 tahun | 205.260.000,00 |
| 2 | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 72 Bulan | 6 tahun | 45.000.000,00 |
| 2 | 1 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 9 Kegiatan | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 2 | 1 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 6 unit | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 6 unit | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 2 | 1 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 6 Paket | 6 tahun | 45.000.000,00 |
| 2 | 1 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 1 unit | 1 tahun | 45.000.000,00 |
| 2 | 1 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | 72 bulan | 6 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 1 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 6 Paket | 6 tahun | 125.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 36 orang | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 2 | 2 |  | Sub Bidang Kesehatan |  |  |  |
| 2 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | 6 Paket | 6 tahun | 200.000.000,00 |
| 2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 18 kelompok | 6 tahun | 400.000.000,00 |
| 2 | 2 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | 6 Paket | 6 tahun | 15.000.000,00 |
| 2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6 Paket | 6 tahun | 500.000.000,00 |
| 2 | 2 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | 6 Paket | 6 tahun | 15.000.000,00 |
| 2 | 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 18 kelompok | 6 tahun | 150.000.000,00 |
| 2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | 60 orang | 6 tahun | 15.000.000,00 |
| 2 | 2 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3 kelompok | 3 tahun | 50.000.000,00 |
| 2 | 2 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3 kelompok | 3 tahun | 171.841.000,00 |
| 2 | 3 |  | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |  |  |
| 2 | 3 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 100 m | 1 tahun | 10.000.000,00 |
| 2 | 3 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 2.850 m | 4 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 3 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1.000 m | 2 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 3 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | 2 unit | 2 tahun | 10.000.000,00 |
| 2 | 3 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | 2.400 m | 4 tahun | 50.000.000,00 |
| 2 | 3 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 2 unit | 2 tahun | 50.000.000,00 |
| 2 | 3 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | 6 unit | 6 tahun | 30.000.000,00 |
| 2 | 3 | 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 1 unit | 1 tahun | 30.000.000,00 |
| 2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 1.000 m | 1 tahun | 175.000.000,00 |
| 2 | 3 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 1.300 m | 1 tahun | 175.000.000,00 |
| 2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 150 m | 1 tahun | 50.000.000,00 |
| 2 | 3 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa | 1 unit | 1 tahun | 35.000.000,00 |
| 2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | 150 m | 1 tahun | 75.000.000,00 |
| 2 | 3 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 2 unit | 2 tahun | 200.000.000,00 |
| 2 | 3 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | 150 m | 1 tahun | 300.000.000,00 |
| 2 | 3 | 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | 1 Kegiatan | 1 tahun | 10.000.000,00 |
| 2 | 3 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | 1 Kegiatan | 1 tahun | 10.000.000,00 |
| 2 | 3 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa | 1 unit | 1 tahun | 75.000.000,00 |
| 2 | 4 |  | Sub Bidang Kawasan Permukiman |  |  |  |
| 2 | 4 | 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 6 Paket | 6 tahun | 42.000.000,00 |
| 2 | 4 | 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | 6 Paket | 6 tahun | 806.676.000,00 |
| 2 | 4 | 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 175 RT | 1 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 4 | 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) | 1.200 m | 6 tahun | 250.000.000,00 |
| 2 | 4 | 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 6 Paket | 6 tahun | 504.160.000,00 |
| 2 | 4 | 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 1.600 m | 3 tahun | 250.000.000,00 |
| 2 | 4 | 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 300 m | 1 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 4 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | 2 unit | 1 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 4 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 900 RT | 3 tahun | 600.000.000,00 |
| 2 | 4 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) | 1.875 m | 4 tahun | 150.000.000,00 |
| 2 | 4 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 126 m2 | 1 tahun | 160.000.000,00 |
| 2 | 4 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 1.875 m | 4 tahun | 150.000.000,00 |
| 2 | 4 | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 30 m | 1 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 5 |  | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |  |
| 2 | 5 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 6 Kegiatan | 6 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 5 | 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 6 Kegiatan | 6 tahun | 10.000.000,00 |
| 2 | 6 |  | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |  |  |  |
| 2 | 6 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 6 Paket | 6 tahun | 10.000.000,00 |
| 2 | 6 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | 36 buah | 6 tahun | 20.030.000,00 |
| 2 | 6 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 6 Paket | 6 tahun | 20.000.000,00 |
| 2 | 8 |  | Sub Bidang Pariwisata |  |  |  |
| 2 | 8 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 1 Kegiatan | 1 tahun | 100.000.000,00 |
| 2 | 8 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 1 Kegiatan | 1 tahun | 500.000.000,00 |
| 2 | 8 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 1 Kegiatan | 1 tahun | 200.000.000,00 |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | 7.989.967.000,00 |
| 3 |  |  | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |  |  |  |
| 3 | 1 |  | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |  |  |  |
| 3 | 1 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) \*\* | 198 orang | 6 tahun | 107.000.000,00 |
| 3 | 1 | 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 198 orang | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 3 | 1 | 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | 198 orang | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 3 | 1 | 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 198 orang | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 3 | 1 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | 6 Kegiatan | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 3 | 1 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | 12 orang | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 3 | 1 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | 6 Kegiatan | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 3 | 2 |  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |  |  |  |
| 3 | 2 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 12 grup | 6 tahun | 250.000.000,00 |
| 3 | 2 | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 6 Paket | 6 tahun | 120.650.000,00 |
| 3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 28 kegiatan | 6 tahun | 234.735.000,00 |
| 3 | 2 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | 6 Paket | 6 tahun | 60.000.000,00 |
| 3 | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | 6 Paket | 6 tahun | 103.000.000,00 |
| 3 | 3 |  | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga |  |  |  |
| 3 | 3 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 12 grup | 6 tahun | 47.860.000,00 |
| 3 | 3 | 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa | 204 orang | 6 tahun | 60.000.000,00 |
|  | 3 | 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 204 orang | 6 tahun | 60.000.000,00 |
| 3 | 3 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 6 Paket | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 3 | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 6 Paket | 6 tahun | 56.750.000,00 |
| 3 | 3 | 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 12 grup | 6 tahun | 48.000.000,00 |
| 3 | 4 |  | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |  |  |  |
| 3 | 4 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat | 6 orang | 6 tahun | 27.000.000,00 |
| 3 | 4 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 174 orang | 6 tahun | 90.784.000,00 |
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | 144 orang | 6 tahun | 91.577.000,00 |
| 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 6 kelompok | 5 tahun | 60.000.000,00 |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | 1.642.356.000,00 |
| 4 |  |  | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |  |  |  |
| 4 | 1 |  | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |  |  |  |
| 4 | 1 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | 5 Kelompok | 4 tahun | 50.000.000,00 |
| 4 | 1 | 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan | 5 Kelompok | 4 tahun | 10.000.000,00 |
| 4 | 2 |  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |  |  |  |
| 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | 6 Paket | 6 tahun | 100.000.000,00 |
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | 30 kelompok | 6 tahun | 100.000.000,00 |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | 30 kelompok | 6 tahun | 1.199.400.000,00 |
| 4 | 2 | 04 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 6.500 m | 4 tahun | 50.000.000,00 |
| 4 | 2 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 30 kelompok | 6 tahun | 15.000.000,00 |
| 4 | 3 |  | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |  |  |  |
| 4 | 3 | 01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | 6 orang | 6 tahun | 53.534.000,00 |
| 4 | 3 | 02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | 54 orang | 6 tahun | 15.000.000,00 |
| 4 | 3 | 03 | Peningkatan kapasitas BPD | 30 orang | 6 tahun | 12.000.000,00 |
| 4 | 4 |  | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |  |  |  |
| 4 | 4 | 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 6 Paket | 6 tahun | 12.000.000,00 |
| 4 | 4 | 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 6 Paket | 6 tahun | 10.000.000,00 |
| 4 | 4 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 30 orang | 6 tahun | 10.000.000,00 |
| 4 | 5 |  | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |  |  |  |
| 4 | 5 | 01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 6 Paket | 6 tahun | 10.000.000,00 |
| 4 | 5 | 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | 6 Kegiatan | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 4 | 5 | 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian | 6 Kegiatan | 6 tahun | 25.000.000,00 |
| 4 | 6 |  | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |  |  |  |
| 4 | 6 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) | 1 unit | 1 tahun | 10.000.000,00 |
| 4 | 6 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | 6 Kegiatan | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 4 | 7 |  | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |  |  |  |
| 4 | 7 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | 6 Kegiatan | 6 tahun | 100.000.000,00 |
| 4 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | 2 Kegiatan | 6 tahun | 500.000.000,00 |
| 4 | 7 | 03 | Pengembangan Industri kecil level Desa | 20 orang | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| 4 | 7 | 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) | 20 kelompok | 6 tahun | 50.000.000,00 |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | 2.456.934.000,00 |
| Jumlah Total | | | | | | 17.801.011.460,00 |

# BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kegiatan pembangunan Desa Joanyar yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun (melalui penyelarasan kebijakan pembangunan Desa, mulai dari Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat), dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Sebaik atau sesederhana apaun perencanaan pembangunan yang telah disusun, keberhasilan dalam mewujudkan perncanaan itu sangat tergantung dari semangat para penyelenggara Pemerintahan Desa Joanyar dengan tetap melibatkan semua komponen Masyarakat Desa Joanyar sebaik wujud implementasi nilai **gotong royong**. Moto MATANGI yang telah diuraikan maknanya di BAB IV harus betul-betul dijadikan spirit moral dan indikator dalam hal cara atau strategi mengimplementasikan RPJM Desa ini, dengan jalan menanyakan Apakah pembangunan Desa Joanyar sudah dilaksanakan secara:

* + - 1. **Mandiri?**
      2. **Adaptif?**
      3. **Transparan?**
      4. **Akuntabel?**
      5. **Nyaman?**
      6. **Gotong-royong?**
      7. **Inovatif?**

Selain Moto di atas, Tim Penyusun merekomendasikan 4 (empat) tangga atau tahapan penting yang sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RPJMDes ini agar berhasil mencapai tujuan (**goal**) yaitu **Harmony (harmonisasi), Regulations (aturan-aturan/standar operasional prosedur), Achievement (capaian), Goal (tujuan)**.

**Harmony** masksudnya harmonisasi (Hita) pada semua aspek sebagai wujud implementasi nilai Tri Hita Karana, mutlak harus dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Joanyar. Atau sebaliknya **disharmonisasi** akan mengancam pencapaian-pencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi diskriminasi karena aspirasi yang berbeda dalam konteks pelaksanaan sebelum Pemilihan Perbekel namun semua dirangkul dan dijadikan kekuatan dalam membangun Desa Joanyar sesuai dengan konsepsi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Aset.

**Regulations** maksudnya Pemerintahan Desa Joanyar hendaknya secara terus menerus mengembangkan produk-produk hukum di tingkat Desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, termasuk pengembangan SOP, sebagai alat untuk memandu memberikan layanan Pembangunan di Desa Joanyar.

**Achievement** maksudnya jika harmonisasi dan aturan sudah terjadi/tersusun, maka capaian hasil pembangunan sebagai representasi dari prestasi kerja pasti akan tercapai.

**Goal** maksudnya tujuan pembangunan bisa dicapai jika prestasi demi prestasi pembangunan sudah diraih. Desa Mandiri sebagi Visi pembangunan Desa Joanyar akan terwujud jika prestasi demi prestasi dapat diraih.

Dengan semangat gotong royong mari kita wujudkan Desa Joanyar untuk bisa menjadi Desa dengan kategori **Desa Mandiri**.

**LAMPIRAN**

1. Matrik Program Kegiatan Prioritas sesuai dengan Bidang, Sub Bidang/Kegiatan RPJM Desa
2. SK Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Laporan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Desa
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
5. Berita Acara Lokakarya Desa
6. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa
7. Berita Acara Musdes Rancangan RPJM Desa
8. Berita Acara Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan Perdes RPJM Desa
9. SK BPD Penetapan Kesepakatan Penetapan Perdes RPJM Desa
10. Foto Dokumentasi